

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

**PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL  
DALAM PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA  
ALAM GUNUNG MEJA DI KABUPATEN MANOKWARI  
(STUDI KASUS KAMPUNG AYAMBORI)**

**TESIS**



**ALTAR SAWAKI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PAPUA  
MANOKWARI  
2017**

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

**PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL  
DALAM PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA  
ALAM GUNUNG MEJA DI KABUPATEN MANOKWARI  
(STUDI KASUS KAMPUNG AYAMBORI)**

**TESIS**

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam  
memperoleh Gelar Magister Sains pada  
Program Pascasarjana UNIPA**



**ALTAR SAWAKI  
NIM. 201202022**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PAPUA  
MANOKWARI  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul** : PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL  
 DALAM PROGRAM PENGELOLAAN  
 TAMAN WISATA ALAM GUNUNG MEJA DI  
 KABUPATEN MANOKWARI (STUDI KASUS  
 KAMPUNG AYAMBORI)

**Nama** : Altar Sawaki

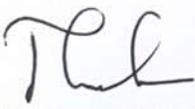
**NIM** : 201202022

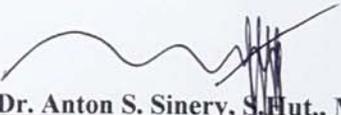
**Proram Studi** : Ilmu Lingkungan

**Program Pendidikan** : Strata 2

Telah diuji oleh tim penguji ujian akhir dan dinyatakan **LULUS**  
 Pada tanggal 17 Juni 2017

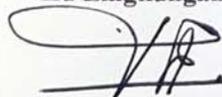
**Disetujui**  
**Komisi Pembimbing**

  
Ludia T. Wambrauw, SP., MAgribus., Ph.D.  
 Ketua

  
Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP.  
 Anggota

**Diketahui**

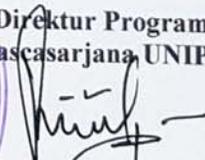
**Ketua Program Studi**  
**Ilmu Lingkungan**



Dr. Ir. Eko Agus Martanto, MP.  
 NIP. 19680229 199203 1 002



**Direktur Program**  
**Pascasarjana UNIPA**



Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs M.Si.  
 NIP. 19640417 199203 1 003



## PENETAPAN PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diuji pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 17 Juni 2017

Panitia Penguji Tesis

	Nama	Penguji
1.	Ludia T. Wambrauw, SP., MAgribus., Ph.D	Penguji I
2.	Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP	Penguji II
3.	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs M.Si	Penguji III
4.	Dr.Ir. Jacob Manusawai, MH	Penguji IV



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Altar Sawaki  
NIM : 2012 02 022  
Program Studi : Ilmu Lingkungan  
Program Pendidikan : Strata 2

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan bebas plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan PERMENDIKNAS RI No. 17 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Manokwari, 17 Juni 2017

Yang Menyatakan,

Altar Sawaki



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Papua, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Altar Sawaki  
NIM : 2012 02 022  
Program Studi : Ilmu Lingkungan  
Program Pendidikan : Strata 2

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, menyetujui untuk memberikan kepada PPs UNIPA Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM GUNUNG MEJA DI KABUPATEN MANOKWAR (STUDI KASUS KAMPUNG AYAMBORI)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif kepada PPs UNIPA untuk berhak menyimpan, mengalihmedia /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Manokwari

Pada tanggal, 17 Juni 2017

Yang Menyatakan,

Altar Sawaki



## RIWAYAT HIDUP



Altar Sawaki, Lahir di Abepura pada tanggal 24 Februari 1979, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Dorthois Johanis Sawaki dan Ibu Anni Anculina Ajamiseba. Tahun 1985 memulai pendidikan dasar di SD YPPK Reremi Manokwari dan tamat pada tahun 1991 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1991 di SMP Negeri 212 Cilandak Timur Jakarta Selatan dan tamat pada tahun 1994.

Pada tahun yang sama melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas di SMU Negeri 3 Jayapura dan tamat pada tahun 1997. Pendidikan tinggi dimulai tahun 1997 di Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih Program Studi Kehutanan jurusan Budidaya Hutan melalui Seleksi Lokal Siswa Berpotensi hingga tamat tahun 2003. Pada tahun 2003 penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama sebagai staf. Pada tahun 2007 penulis pindah ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat dan ditempatkan di Rehabilitasi Hutan Lahan. Pada tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan, Tenaga Kerja dan Peralatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat tahun 2013. Pendidikan S2 dilanjutkan pada tahun 2012 di Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan UNIPA.

Menikah dengan Anna Amelia tahun 2012 dan dikaruniai seorang putera bernama Immanuel J.B. Sawaki.



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi unsur masyarakat lokal dalam program pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja dan memberikan rumusan alternatif upaya yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja tertinggi pada kelompok keluarga (18 responden atau 46,15%) dan terendah adalah kelompok pemimpin (2 responden atau 5,13%). Hal yang sama dijumpai pada intensitas partisipasi masyarakat. Partisipasi unsur masyarakat di TWA Gunung Meja mencakup unsur pemimpin (5,13%), minat (10,26%), kepala keluarga (46,15%), wanita (20,51) dan pemuda (17,95%) dengan tingkat partisipasi “sangat tidak aktif” yang dipengaruhi fungsi partisipasi masyarakat yang umumnya pada pelaksana kegiatan dan intensitas partisipasi unsur masyarakat yang umumnya memberikan konsultasi dan informasi. Upaya pengelolaan yang dilakukan meliputi Mengupayakan terbentuknya Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sehingga menjadi dasar pengelolaan program, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, melakukan inisiatif tindakan dan pengendalian program, meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti ekonomi dan ekologi hasil-hasil program pengelolaan.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Taman Wisata Alam Gunung Meja



## ABSTRACT

The aim of the research is to know the participation degree of local communities in the management program of Gunung Meja natural recreation park and contribute alternative recommendations for his management based on community the participation. The results of the research, are that community participation in management of Gunung Meja natural recreation park is highest for family group (46,15%) and the lowest is for the leader group (5,13%). The same case also find in community partisipation intensity. The participation of community include leaders, interests, household head, housewife and youth with categorise as very inactive. This inactive result is influenced by community participation function which is in general only participate on activity implementation and share informations as well as consultation. The management efforts are permit of natural tourism utilisation and natural resources tourism infrastructure utilizatio, that can be used as the base of management program.

Keywords: participation, community, Gunung Meja recreation park.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya sehingga penyusunan tesis ini yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja (Studi Kasus Kampung Ayambori)**” dapat diselesaikan.

Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja dalam pengelolaannya telah dilakukan berbagai upaya terkait perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hutan ini, namun ancaman terhadap eksistensi kawasan ini terus berlangsung. Keberadaan pemukiman, kebun masyarakat dan pemanfaatan hasil hutan di areal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini sedang mengalami ancaman terkait fungsinya. Keberadaan potensi tersebut ancaman terhadap kawasan TWA ini bila tidak dikelola secara baik, oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan secara baik sehingga jaminan kelestarian kawasan tetap terjaga dimasa mendatang.

Tesis ini mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja yang mencakup fungsi partisipasi, intensitas partisipasi dan tingkat partisipasi. Selanjutnya dari hasil tersebut dirumuskan arahan pengelolaan guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman wisata ini.

Manokwari, 17 Juni 2017

Altar Sawaki



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Maha Esa, karena atas rahmatNya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja (Studi Kasus Kampung Ayambori)**” dapat diselesaikan.

Pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Papua yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan studi.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Papua yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan studi.
3. Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Papua Yang telah memberikan dukungan selama Pelaksanaan studi.
4. Ibu Ludia Wambrauw, SP., M.Agribus., Ph.D dan Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP, selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis ini.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, atas dukungan dan rekomendasi dalam pelaksanaan proses studi ini.
6. Ibu Ludia Wambrauw, SP., MAgribus., Ph.D dan Dr. Anton S. Sinery, S.Hut., MP, selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis ini.

7. Istri tercinta Anna Amelia dan anaku tersayang Immanuel J.B. Sawaki, yang senantiasa memberi doa dan motivasi untuk pencapaian tujuan pendidikan ini.
8. Orang terkasih Bapak D.J. Sawaki dan A.A. Ajamiseba serta adik-adiku terkasih Welsa N.M. Sawaki, Marselino E.G. Sawaki, S.Ip., M.Si., yang senantiasa memberi doa dan motivasi untuk pencapaian tujuan pendidikan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam studi baik proses perkuliahan dan penelitian sampai penyelesaian tesis, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan rahmatNya kepada kita semua.

Akhirnya semoga tesis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Manokwari, 17 Juni 2017

Altar Sawaki

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya.....	8
2.1.1. Ruang Lingkup Konservasi.....	8
2.1.2. Peran Serta Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya .....	10
2.2. Partisipasi Masyarakat.....	14
2.2.1. Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat .....	14



2.2.2.	Bentuk Partisipasi .....	17
2.2.3.	Tingkat Partisipasi .....	18
2.2.4.	Manfaat Partisipasi .....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>		<b>20</b>
3.1.	Waktu dan Tempat .....	20
3.2.	Alat dan Bahan .....	20
3.3.	Metode dan Teknik .....	21
3.4.	Variabel Pengamatan .....	21
3.5.	Penentuan Responden .....	21
3.6.	Pengumpulan Data .....	22
3.7.	Analisis Data .....	24
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>28</b>
4.1.	Kondisi Umum Taman Wisata Alam Gunung Meja .....	28
4.1.1	Sejarah Kawasan .....	28
4.1.2	Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	32
4.1.3	Iklm .....	33
4.1.4	Topografi dan Kelerengan .....	35
4.1.5	Geologi dan Tanah .....	40
4.1.6	Aksesibilitas .....	42
4.1.7	Nilai Estetika.....	43
4.1.8	Sosial Ekonomi Budaya .....	45
4.2.	Partisipasi Masyarakat.....	48
4.2.1.	Fungsi dan Intensitas Partisipasi Berdasarkan Unsur Masyarakat.....	56
4.2.2.	Tingkat Partisipasi dan Persepsi Unsur Masyarakat .....	66
4.2.3.	Permasalahan, Tujuan dan Alternatif Upaya Mendukung Program Pengelolaan TWA Gunung Meja .....	74





@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1. Kesimpulan .....	79
5.2. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	85



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Matriks Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penelitian .....	24
2. Participation-Empowerment index .....	25
3. Sejarah Kawasan .....	28
4. Jumlah Bulan Kering, Bulan Lembab dan Bulan Basah di Kawasan TWA Gunung Meja dan Sekitarnya Selama 20 tahun Terakhir (1997 – 2016) .....	34
5. Klasifikasi Tipe Iklim di TWA Gunung Meja Menurut Sistem Schmit dan Ferguson .....	35
6. Sifat Fisik Tanah Pada Kawasan TWA Gunung Meja .....	41
7. Jumlah Penduduk di Sekitar TWA Gunung Meja .....	46
8. Fungsi Partisipasi Masyarakat Kampung Ayambori dalam Program Pengelolaan TWA Gunung Meja.....	50
9. Intensitas Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan TWA Gunung Meja .....	54
10. Fungsi dan Intensitas Partisipasi Unsur Masyarakat Dalam Pengelolaan TWA Gunung Meja.....	57
11. Faktor Penentu Partisipasi Masyarakat.....	71
12. Persepsi Masyarakat Tentang Kemauan Berpartisipasi .....	73
13. Alternatif Upaya Pengelolaan TWA Gunung Meja Berbasis Kolaborasi .....	76

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	7
2. Pengambilan Data Pada Pengelola (BBKSDA Papua Barat) .....	22
3. Pengambilan Data Pada Responden Kelompok Masyarakat .....	23
4. Peta Topografi TWA Gunung Meja .....	37
5. Peta Kelerengan TWA Gunung Meja .....	39
6. Pagar Batas Kawasan yang dalam Pembangunannya Melibatkan Masyarakat.....	49

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Data Responden .....	85
2. Partisipasi Masyarakat Kampung Ayambori Berdasarkan Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja.....	87
3. Bentuk Fungsi dan Intensitas Partisipasi Masyarakat Kampung Ayambori Berdasarkan Unsur Masyarakat.....	90
4. Peta Lokasi Penelitian .....	91



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan merupakan upaya pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumberdaya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan.

Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPPLH yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Terkait upaya perlindungan telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah kurang berhasil mengelola sejumlah kawasan lindung atau konservasi karena ketidakmampuan mengimplementasikan sejumlah kebijakan disamping adanya kendala di lapangan



(Sinery dkk, 2015). Menurut Munggoro (1999) pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu secara efektif mengelola kawasan-kawasan lindung atau konservasi yang ada karena keterbatasan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar manajemen kawasan konservasi atau kawasan lindung. Keterbatasan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan, kelangkaan informasi, tidak memadainya keterampilan pegawai kehutanan dan buruknya kelembagaan yang mengelola kawasan. Di sisi lain masalah pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung belum dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan kualitas ekologi secara umum. Menurut Sinery (2015) telah terjadi perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam pada masyarakat sekitar hutan dari kebutuhan dasar (basic needs) menjadi pola keinginan (desire) dengan pertimbangan ekonomi oleh karenanya perlu pengelolaan secara baik sehingga mencapai kelestarian sumberdaya alam sesuai fungsi hutan yang diinginkan.

Pengelolaan hutan lestari perlu didukung manajemen yang terarah dan pasti (Sudrajat, 1999). Menurut Indriyanto (2008) upaya perlindungan hutan menjadi penting dimasa mendatang tujuan agar kelestarian hutan memenuhi fungsi yang meliputi pencegahan dan membatasi kerusakan hutan. Menurut Sinery dan Manusawai (2016) masyarakat merupakan salah satu pihak yang sangat berpengaruh dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat secara nyata betapa eratnya hubungan antara program pengelolaan lingkungan dengan masyarakat sebagai komponen lingkungan, sebagaimana diamanatkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ayat (1) yang mengarahkan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam



pembangunan dibidang kehutanan; ayat (2) bahwa Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; dan ayat (3) bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu forum pemerhati kehutanan.

Terkait dengan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mampu diupayakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi peran masyarakat. Dalam hal ini optimalisasi peran masyarakat dalam program pengelolaan merupakan suatu langkah lebih maju dalam pengeloaan lingkungan sehingga diharapkan dapat mewujudkan implementasi program secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi kawasan baik potensi pendukung pengelolaan, maupun potensi terkait ancaman perubahan fungsi kawasan seperti halnya di Taman Wisata Alam Gunung Meja.

## 1.2. Rumusan Masalah

Hutan Gunung Meja merupakan salah satu kawasan pelestarian alam berstatus Taman Wisata Alam (TWA) di wilayah Provinsi Papua Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 91/Menhut-II/2012 dengan luas wilayah 462,16 Ha. Kawasan ini berada pada 16 - 177 m dpl dan merupakan laboratorium alam yang menyimpan keanekaragaman jenis flora maupun fauna yang cukup tinggi dan sebagai tandon air bagi kota Manokwari (Leppe dan Tokede, 2004; Sinery, 2006; Manusawai dan Leonard, 2015). Sesuai hasil survey spasial WWF tahun 2002 diketahui bahwa terdapat 5 mata air di dalam kawasan ini, sedangkan berdasarkan laporan perusahaan daerah air minum



Kabupaten Manokwari, ada 12 mata air yang menjadi sumber pasokan air bagi masyarakat Kota Manokwari dan 7 diantaranya terdapat di dalam dan sekitar hutan ini (Liborang, 2004). Menurut Manusawai dan Leonard (2015) kawasan TWA Gunung Meja memiliki 223 jenis vegetasi hutan yang mencakup 159 jenis vegetasi tingkat pohon, 149 jenis vegetasi tingkat tiang, 164 jenis vegetasi tingkat pancang dan 177 jenis vegetasi tingkat semai. Disebutkan lebih jauh bahwa tingkat keanekaragaman jenis vegetasi hutan ini adalah tinggi (4,38) pada vegetasi tingkat pohon, sedangkan pada tingkat semai mencapai 1,79 dengan kategori sedang.

Kawasan TWA Gunung Meja terletak di tengah Kota Manokwari sehingga mudah diakses dan rawan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan konversi kawasan. Menurut Ohuiwutun (1995) dalam Sinery (2006) kerusakan TWA Gunung Meja akibat aktifitas masyarakat di sekitarnya telah mencapai 8,9 ha. Menurut Apriani (2003), pemanfaatan lahan Hutan TWA Gunung Meja tahun 2002 sebesar 39,42 ha dengan intensitas 8,6%, mencakup perladangan 35,32 ha (intensitas 7,68%), penebangan 0,81 ha (intensitas 0,18%), bekas perladangan 0,34 ha (intensitas 0,09%) dan penggunaan lain 2,95 ha (intensitas 0,64%). Kondisi ini mengakibatkan degradasi kawasan hutan yang menjadi potensi wisata unggulan dan fragmentasi habitat berbagai jenis satwa liar. Selanjutnya menurut Kondororik (2012), ada 30 lokasi tumpukan sampah dengan luas areal tumpukan 2.054 m<sup>2</sup> atau 0,2054 Ha. Menurut Manusawai dan Leonard (2015) terdapat 5 kelurahan di sekitar wilayah TWA Gunung Meja yang masyarakatnya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dinamika kawasan hutan



ini. Pengaruh dimaksud khususnya eksistensi luas kawasan hutan dari hutan alam menjadi kebun atau lahan terbuka.

Kawasan hutan TWA Gunung Meja sejak penetapannya dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat melalui Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah II Manokwari. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan terkait perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hutan ini, namun ancaman terhadap eksistensi kawasan terus berlangsung. Hal ini diduga akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk tetapi juga akibat pengelolaan program pengelola yang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan para pihak khususnya masyarakat. Kondisi tersebut diduga mempengaruhi tingkat partisipasi para pihak dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan hutan ini.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja;
- 2) Memberikan rumusan alternatif upaya yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan TWA Gunung Meja berbasis partisipasi masyarakat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

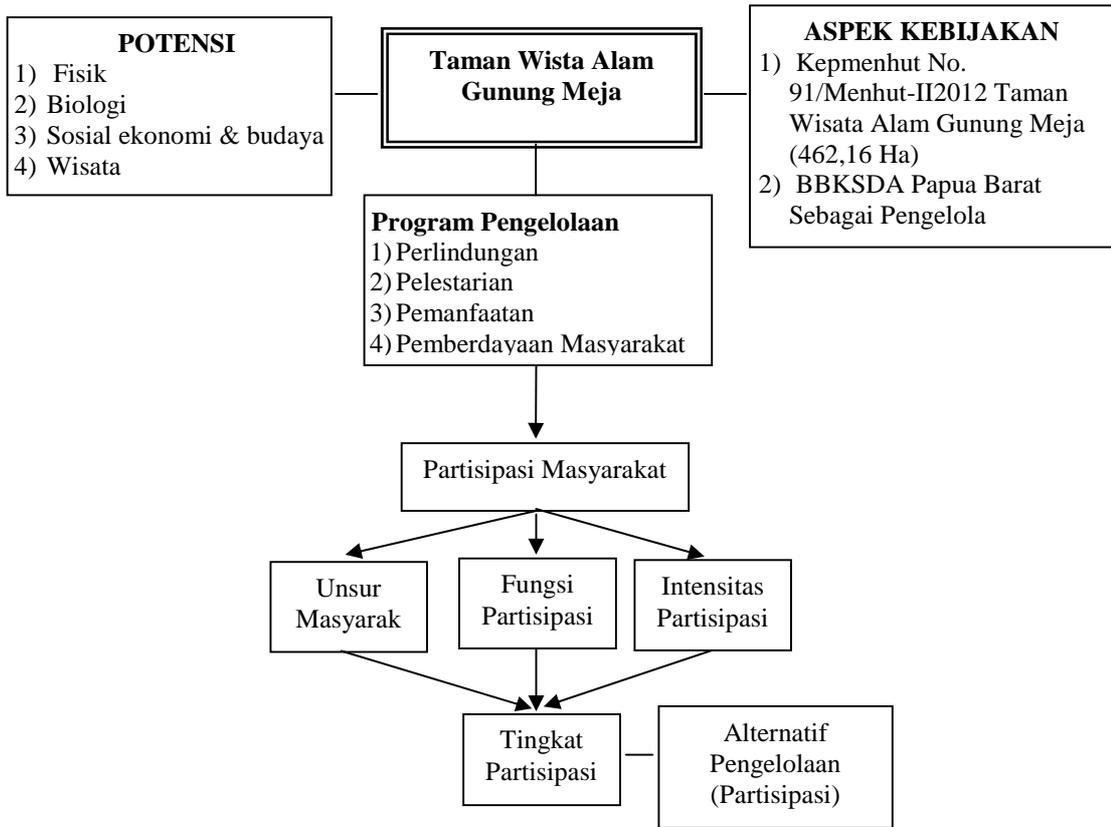
- 1) Sebagai bahan masukan/rujukan bagi pemerintah dan instansi yang berwenang dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja.



@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

- 2) Bagi masyarakat; sebagai acuan dan sumber informasi yang dapat melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya

##### 2.1.1. Ruang Lingkup Konservasi

Konservasi sumberdaya alam bukanlah memelihara persediaan secara permanen tanpa pengurangan dan pengrusakan, karena jika demikian penggunaan sama dengan nol (Wantrup, 1986 dalam Suparmoko, 1997). Lebih lanjut dikemukakan oleh Suparmoko (1997), konservasi sering diartikan pengurangan atau peniadaan penggunaan, karena lebih mementingkan bentuk penggunaan yang lain dalam hal sumberdaya itu memiliki penggunaan yang bermacam-macam (*multiple use resource*). Sementara menurut Aipassa (1998), yang dimaksud dengan konservasi adalah suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam (meliputi sumberdaya hutan, tanah dan air).

Bila dikaitkan dengan sumberdaya hutan, Bratawinata (1997), menyatakan konservasi hutan adalah suatu kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan sumberdaya lestari, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan kerusakan kawasan hutan, hasil hutan dan kelestarian hutan.

Bila membahas konservasi sumberdaya hutan, maka terkait erat dengan kawasan konservasi yakni kawasan dimana konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan. Pengertian kawasan konservasi yang ditemukan dalam literatur yang ada dan digunakan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan



suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung. Dimana kawasan konservasi ini ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Sembiring dkk 1999).

Pemanfaatan hutan dan tanah hutan yang tidak diikuti tindakan konservasi akan menimbulkan perubahan ekosistem, yang berarti rusaknya keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini senada yang dinyatakan oleh Zain (1997), makna hutan sebagai bagian dari ekosistem sangat penting didalam pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang yang tercakup dalam tugas umum pembangunan. Menurut Suparmoko (1997), tindakan konservasi ini amat perlu khususnya bagi sumberdaya alam yang sifatnya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*) dengan sendirinya. Tindakan konservasi bagi sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) dapat dilakukan dengan hati-hati, misalnya konservasi hutan dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih, reboisasi, dan penghijauan.

Sembiring, dkk. (1999), mengemukakan bahwa kawasan konservasi memiliki peran dan artipenting dalam kehidupan, karena ia memiliki nilai-nilai nyata dan intristik yang tak terhingga : Ekologi, ekonomi, sosial dan sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik antara lain dengan menekankan desentralisasi dan peran serta masyarakat.

Di pihak lain seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi, maka tekanan terhadap sumberdaya alam menjadi semakin besar, karena tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumberdaya



alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat diketahui betapa pembukaan hutan, kegiatan pertambangan dan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lain dari tahun ketahun bukannya menurun tetapi semakin besar. Dengan demikian kawasan eksploitasi tersebut kian terancam habis dan ancaman terhadap kawasan lindung atau kawasan konservasi pun terjadi (Sembiring, dkk,1999).Oleh karenanya dibutuhkan adanya berbagai program pembangunan nasional yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut (Aipassa, 2002) :

- 1) Program pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Program peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
- 3) Program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan;
- 4) Program pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- 5) Program penataan hukum dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **2.1.2. Peran Serta Masyarakat Lokal dan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya**

Masalah yang banyak dihadapi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan melalui pembentukan kawasan konservasi diberbagai belahan dunia adalah adanya tekanan penduduk terhadap kawasan konservasi bersangkutan. Fenomena ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa, jauh sebelum kawasan-



kawasan konservasi tersebut terbentuk, kawasan tersebut sebenarnya sudah berperan sebagai sumberdaya sosio-ekonomis dan sosio-kultural bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitarnya, baik dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Kegagalan dalam menangkap “nilai” dan “makna” yang ada dalam proses interaksi itulah yang kemudian menjadi banyak kebijaksanaan dan program yang ada dalam suatu sistem pengelolaan kawasan konservasi tertentu tidak berjalan (Zakaria, 1994).

Hutan sebagai ekosistem, tidak hanya merupakan kumpulan vegetasi dan satwa. Di beberapa kawasan hutan, komponen manusia dalam hal ini masyarakat telah menjadi bagian yang integral dari hutan, bahkan turut menentukan eksistensi dari ekosistem yang ada. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka memanfaatkan hasil hutan dan atau lahan hutan (Sardjono dkk, 1998).

Von Maydell (1989) dalam Sardjono, dkk (1998), mengelompokkan masyarakat lingkungan hutan menjadi dua bagian besar yaitu :

- 1) Masyarakat di dalam kawasan hutan (*Forest dwellers*) yang dapat dikatakan sebagai komponen alami dari ekosistem hutan karena sudah turun temurun tinggal di dalam hutan, meski tidak memiliki tempat tinggal tetap;
- 2) Masyarakat di lingkungan hutan (*rural people*), yang merupakan masyarakat yang tinggal secara tetap (“desa”), baik di dalam ataupun disekitar hutan.

Didalam kehutanan juga dikenal istilah masyarakat lokal (*local society*) dan istilah ini menurut Pranoto (2001), sering digunakan untuk masyarakat yang



berada di dalam ataupun disekitar hutan. Poli (1997) dalam Sutrisno (2004), menyatakan bahwa masyarakat lokal adalah : (1). sejumlah orang; (2). Tempat; (3). Cukup lama; sehingga menghasilkan; (4) *Common way of life*.

Menurut Simpoha (1998), yang dimaksud masyarakat lokal/setempat, yaitu kelompok masyarakat yang berdiam di dalam dandi sekitar hutan dan berinteraksi dengan hutan sejak turun temurun. Mereka adalah masyarakat asli yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat dan atau masyarakat adat. Masyarakat lokal / setempat dapat terdiri dari :

- 1) Masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang teratur bersifat tetap, mempunyai keluasan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat;
- 2) Masyarakat adat yaitu masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus;
- 3) Masyarakat campuran (termasuk pendatang), yang oleh karena perkembangan kemajuan sebagai negara kesatuan telah menyebabkan terjadinya perpindahan warga masyarakat dari tempat lain ke dalam dan di sekitar hutan, baik oleh karena program pemerintah (transmigrasi, permukiman kembali) maupun kehendak atau prakarsanya sendiri.

Soemarwoto (1987), menyatakan bahwa masyarakat lokal/tradisional secara umum mempunyai pola pikir yang imanen, dimana mereka memandang



sumberdaya alam termasuk hutan di dalamnya tidak terpisahkan dari sistem sosial karena keduanya merupakan komponen ekosistem, pemanfaatan yang berlebihan apalagi merusak akan memusnahkan kehidupannya sendiri.

Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAHE) Nomor 5 tahun 1990 menegaskan, “konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat” (pasal 4). Artinya pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang setara. Tetapi kesetaraan tanggung jawab dan kewajiban tersebut tidak diikuti dengan kesamaan peran dalam pengelolaan kawasan-kawasan lindung (Kawasan konservasi) (Sangaji, 2002).

Lebih lanjut Sangaji (2002), menyatakan nasib peran serta rakyat, seperti diatur dalam pasal 37 UUKSDAHE Nomor 5 tahun 1990, maka jauh lebih menyedihkan. Dalam ayat (1) disebutkan, peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan, mengandung pengertian negatif, mengesankan rakyat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa, tidak teratur dan pasif.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) Pasal 70 dinyatakan: Ayat (1) masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan; Ayat (2), Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; Ayat (3), dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintahpusat dan pemerintah daerah dapat dibantu forum pemerhati kehutanan. Memperhatikan isi Pasal 70 tersebut di atas jelas sekali bahwa peran



serta masyarakat dalam pembangunan bidang kehutanan sangatlah mendapat perhatian.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan di Indonesia harus berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan. Pesan ini menunjukkan paradigma baru dalam penyelenggaraan kehutanan yang mewajibkan pengelolaan hutan yang benar dalam berbagai hal (Sutisna, 2000), yaitu:

- 1) Hutan fungsi manapun harus bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai fungsi hutan tersebut (lindung, produksi, konservasi);
- 2) Manfaat hutan bukan hanya dapat dinikmati masyarakat sesaat melainkan harus berkelanjutan. Baik dalam hal nilai ekonomis maupun nilai-nilai lainnya (estetika, ilmiah, budaya). Artinya bila ada kawasan hutan yang rusak, maka generasi sekarang berkewajiban memperbaikinya sampai menjadi produktif kembali dalam fungsi utamanya;
- 3) Penyelenggaraan kehutanan tidak dapat ditentukan dan atau dilakukan sepihak oleh pemerintah yang mewakili Negara seperti di masa lalu, melainkan harus bersama masyarakat secara berkeadilan terpadu.

## **2. 2. Partisipasi Masyarakat**

### **2.2.1. Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat**

Gross, dkk (1958), Berry (1995) dalam Mauliyadi (2005), mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Masih dalam pengertian yang sama



Levinson yang dikutip Soekanto (1990), menyatakan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Keturtsertaan orang mengambil bagian atau memainkan suatu peranan dalam suatu bagian atau seluruh kegiatan pembangunan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, perolehan dan pembagian keuntungan, dan penilaian, disebut partisipasi masyarakat (Sallatang, 1987).

Adjid (1985), mengemukakan bahwa untuk memahami partisipasi, maka perlu terdapat beberapa kriteria yang tersimpul dalam istilah partisipasi itu sendiri yaitu:

- 1) Partisipasi mengacu kepada adanya beberapa subjek yang berinteraksi seperti individu, masyarakat, organisasi, perekonomian dan pemerintah yang masing-masing mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri tetapi dalam ikatan solidaritas tertentu;
- 2) Terdapat kesukarelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan yang diberikan organisasi secara ikhlas;
- 3) Partisipasi bermakna kepada keterlibatan anggota masyarakat dalam proses suatu kegiatan;
- 4) Adanya kelompok sasaran (target-target) dari suatu kegiatan yang menjadi ajang partisipasi.

Terdapat beberapa pengertian partisipasi (masyarakat) didasarkan pada berbagai sumber yang berbeda sebagai berikut :



- 1) Misra (1984) dalam Margiyono (1999), menyatakan apabila dikaitkan dengan upaya mendukung program pemerintah pengertian partisipasi adalah keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam implementasi kegiatan, namun juga dalam pengambilan keputusan dan turut menikmati hasil keuntungan yang diperolehnya dari suatu program/proyek;
- 2) Sembiring, dkk (1999), menyatakan defenisi partisipasi bila dikaitkan dengan peranan masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat di dalam urusan pembangunan baik secara perorangan maupun dalam bentuk kelembagaan dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- 3) Canter (1997) dalam Pranoto (2001), defenisi partisipasi masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas pengelolaan suatu kawasan.

Meningkatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat lokal berbeda peranannya, maka menurut Poli (1997) dalam Mulyadi (2005) terdapat tiga aspek dalam pengertian partisipasi yaitu :

- 1) Luasnya partisipasi (siapa yang berpartisipasi); pemimpin saja, kelompok minat, keseluruhan rumah tangga, wanita, pemuda/anak-anak;
- 2) Fungsi partisipasi (dalam hal apa partisipasinya); apakah dalam haldistribusi/penggunaan, pemeliharaan, pelaksanaan, perencanaan atau manajemen;



- 3) Intensitas partisipasi (bagaimana partisipasinya); memberikan informasi, memberikan konsultasi, pengambilan keputusan, memprakarsai tindakan, pengendalian total.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang digunakan adalah pengertian partisipasi menurut Poli (1997) dalam Mulyadi (2005) tersebut terakhir di atas.

### 2.2.2. Bentuk Partisipasi

Menurut Cormick (1979) dalam Sembiring, dkk (1999), partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu : Pertama, partisipasi yang bersifat konsultatif dimana anggota masyarakat punya hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, akan tetapi keputusan terakhir tetap ditangan pembuat kebijakan/keputusan; Kedua, partisipasi yang bersifat kemitraan dimana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan dan secara bersama-sama pula membuat keputusan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Margiyono (1999), ada empat macam bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan (*decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan (*implementation*), partisipasi dalam menerima manfaat dan hasil-hasil pembangunan (*benefit*) dan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan (*monitoring andevaluation*).

Tjokroamidjo (1987) yang dikutip Margiyono (1999), membagi partisipasi dalam tiga bentuk yaitu : Pertama, partisipasi masyarakat dalam penentuan arah,



strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan bersama-sama pemerintah; Kedua, partisipasi dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; Ketiga, partisipasi pada keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

### 2.2.3. Tingkat Partisipasi

Menurut Arnstein (1969) dalam Arimbi dan Santosa (1993), peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapat keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat Tipologinya yang dikenal dengan; delapan tangga peran serta masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*). Selanjutnya Arnstein (1969) menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non peran serta”, dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan : (1) Terapi; (2) Manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang berperan serta. Tangga ketiga, ke empat dan ke lima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Termasuk dalam tingkat “Tokenisme” adalah : (3) Penyampaian informasi (*informing*); (4) Konsultasi (*consultation*); dan (5) Peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas dalam tingkat “kekuasaan masyarakat” (*citizen power*) masyarakat



dalam tingkat ini memiliki pengaruh dalam penroses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) Kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama penguasa atau pada tingkatan yang lebih tinggi, (7) Pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan(8) Pengawasan masyarakat (*citizen power*). Pada tingkat ketujuh dan kedelapan masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijaksanaan tertentu.

#### 2.2.4. Manfaat Partisipasi

Menurut Santosa dalam Sembiring, dkk (1999), partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat utama diantaranya :

- a). Sebagai proses pembuatan kebijakan, karena masyarakat justru sebagai kelompok yang menanggung konsekuensi dari suatu kebijakan, memiliki hak untuk dikonsultasi (*right to consult*);
- b). Sebagai suatu strategi, dimana melalui partisipasi masyarakat suatu kebijakan pemerintah akan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga keputusan memiliki kredibilitas (*credible*);
- c). Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan sebagai alat komunikasi bagi pemerintah yang dirancang untuk melayani masyarakat guna mendapatkan informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang responsif;
- d). Partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan konflik, didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapat yang ada.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam Gunung Meja (TWA Gunung Meja) Provinsi Papua Barat dan difokuskan pada masyarakat di Kampung Ayambori. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada akses masyarakat terhadap kawasan hutan dan kepemilikan hak ulayat serta fokus kegiatan pengelolaan oleh BBKSDA Papua Barat melalui Bidang KSDA Wilayah II Manokwari. Menurut Manusawai dan Leonard (2015) masyarakat di Kampung Ayambori memiliki hubungan yang sangat erat dengan dinamika kawasan TWA Gunung Meja karena berada di sekitar kawasan ini sehingga menjadi fokus pengelolaan kawasan oleh badan pengelola. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan (April – Juni 2017) mencakup persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan tesis.

#### **3.2. Alat dan Bahan**

Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan objek-objek penting di lapangan yang terkait dengan ruang lingkup tesis guna mempermudah pembahasan;
2. Tape recorder/HP, digunakan untuk merekam informasi saat dilakukan wawancara sehingga dapat dipastikan tidak ada informasi responden yang hilang;

3. Alat dan bahan tulis menulis, kalkulator, dan komputer; digunakan untuk pengolahan data dan penyusunan tesis;
4. Kuisisioner, digunakan untuk mendapatkan data primer dari responden yang merupakan data utama untuk dianalisa dalam penelitian ini;
5. Peta-peta dan dokumen-dokumen hasil penelitian terdahulu maupun berbagai laporan lainnya berkaitan dengan kawasan TWA Gunung Meja, digunakan sebagai sumber informasi pendukung/sekunder.

### **3.3. Metode dan Teknik**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Metode deskriptif dimaksudkan bahwa penelitian dilakukan dengan menggambarkan kondisi variabel atau data penelitian sesuai hasil pengamatan (observasi) dan wawancara.

### **3.4. Variabel Pengamatan**

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas variabel utama dan variabel penunjang. Variabel utama terdiri atas program pengelolaan oleh badan pengelola, unsur masyarakat yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dan keterlibatan masyarakat pada fungsi dan intensitas partisipasi. Selanjutnya variabel penunjang dalam penelitian ini terdiri atas data keadaan umum TWA Gunung Meja.

### **3.5. Penentuan Responden**

Responden yang disampel ditentukan dengan cara “*Stratified Sampling*” yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan membagi populasi dalam beberapa strata sesuai dengan tuntutan rumusan pengolahan data yang digunakan

dalam penelitian ini. Strata populasi dimaksud terdiri atas a) pemimpin (*leader*), b) kelompok minat (*interest group*), c) keseluruhan kepala keluarga (*all households*), d) wanita (*women*) dan e) pemuda (*youth*).



Gambar 2. Pengambilan Data Pada Pengelola (BBKSDA Papua Barat)

Jumlah sampel informan kunci untuk unsur pemimpin sebanyak 2 responden yang merupakan aparat pemerintahan. Jumlah sampel untuk unsur minat sebanyak 4 responden yang merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan dapat dikelompokkan tersendiri berdasarkan komoditi, tujuan bertani (sayuran dan pisang untuk dijual) serta luas lahan yang dikelola (1,5 – 2 ha). Selanjutnya jumlah responden kepala keluarga sebanyak 18 responden, unsur wanita sebanyak 8 responden dan unsur pemuda sebanyak 9 responden.

### 3.6. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi; merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, sehingga dapat mendeskripsikan

secara faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia serta konteks dimana kegiatan itu berada;

2. Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya;
3. Studi dokumentasi; merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data tertulis melalui buku, gambar, foto ataupun yang sejenisnya guna mendukung data-data yang diperoleh melalui observasi dan kuisioner.



Gambar 3. Pengambilan Data Pada Responden Kelompok Masyarakat



Gambaran secara garis besar tentang jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Matriks Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penelitian

Tujuan Studi	Pokok bahasan	Data Kunci	Sumber Data Metode	Hasil yang Diharapkan
Deskripsi potensi masyarakat lokal dalam pengelolaan TWA Gunung Meja	Kondisi Biogeofisik lokasi penelitian	Administrasi wilayah, iklim, tanah, topografi, vegetasi dan fauna	Data sekunder; pustaka, peta, dokumentasi, data statistik, dan observasi lapangan	Gambaran umum potensi lokasi penelitian
	Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat	Masyarakat ; Analisis peran, kelompok, jumlah, pendidikan, ciri budaya, bentuk permukiman, jumlah anggota keluarga, status kependudukan Administrasi : Struktur organisasi, jasa pelayanan, tantangan kebijakan Ekonomi : Mata pencaharian, pendapatan (kebun, peternakan, perkebunan dan usaha lainnya)	Data primer; wawancara dengan responden  Data sekunder ; pustaka, data statistik, foto  Data primer; wawancara dengan responden	Gambaran kondisi masyarakat pada lokasi penelitian
Mengidentifikasi, optimalisasi fungsi dan tingkat partisipasi serta memberikan rumusan alternatif	Faktor eksternal	Fungsi partisipasi, intensitas partisipasi, persepsi masyarakat lokal	Data primer; wawancara dengan responden	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan TWA Gunung Meja
Pengelolaan TWA Gunung Meja berbasis partisipasi	Faktor internal	Kebijakan pemerintah (Perda, UU), kelembagaan, penerapan pengelolaan TWA Gunung Meja berbasis partisipasi	Data sekunder ; pustaka, data statistik dan foto	Potensi dan prospek pengembangan program pengelolaan TWA Gunung Meja

### 3.7. Analisis Data

Data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :



1. Editing data; setelah data terkumpul seluruhnya, maka dilakukan editing terhadap data yang merupakan kegiatan meneliti kembali data yang diperoleh;
2. Koding; yaitu mengklarifikasikan berdasarkan sumber responden dan mengklarifikasikan jawaban responden sesuai kategorinya;
3. Menghitung frekwensi; setelah koding selesai dikerjakan maka baik sumber responden maupun jawaban responden dapat terdistribusi ke dalam kategori - kategori dan frekwensinya dapat dihitung;
4. Tabulasi; yakni proses penyusunan data dalam bentuk tabel sehingga data dapat dibaca dengan mudah dan maknanya mudah dipahami.

Penilaian tentang tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan program pengelolaan TWA Gunung Meja, didasarkan pada perkalian angka indeks pelaku (*who*), dengan angka indek dalam hal apa (*what*) dan angka indeks bagaimana partisipasi (*how*), sebagaimana terlohat dengan Tabel 2.

Tabel 2. Participation-Empowerment index

Extent (Who)	Function (in What)	Intensity (how)
5. Children / youth	5. Management	5. Total Control
4. Women	4. Planning	4. Initiation Action
3. All households	3. Implementation	3. Decision Making
2. Interest group	2. Maintenance	2. Consultation
1. Leader only	1. Distribution / use	1. Informing

Sumber : Clarence Shubert, Pilo (2001) dalam Sinery dan Manusawai (2016)

Keterangan : angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah indeks.

Berdasarkan perkalian tersebut diperoleh angka tertinggi 125 dan angka terendah 1. Kemudian untuk memberikan skala penilaian tingkat partisipasi masyarakat lokal dari nilai terendah sampai tertinggi dengan pembagian kelompok sebanyak 5 kelompok dengan katagori; (a) sangat tidak aktif; (b) tidak aktif; (c)

cukup aktif; (d) aktif dan; (e) sangat aktif, dilakukan dengan cara sebagai berikut (Sudjana, 1992) :

1. Menentukan rentang nilai dengan rumus :

$$\text{Rentang (R)} = \text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}$$

2. Menentukan banyaknya kelompok, dalam hal ini banyaknya kelas ditentukan sebanyak 5 kelompok sesuai kategori penilaian tersebut diatas.
3. Menentukan panjang kelas dengan persamaan :

$$P = \frac{R}{K}$$

Keterangan : P = Panjang Kelas  
R = Rentang  
K = Banyaknya Kelompok

Dari persamaan diatas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

$$R = 125 - 1 = 124$$

$$K = 5$$

$$P = 124 : 5 = 24,8 \text{ (dibulatkan menjadi 25)}$$

Dengan demikian pengkategorian partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan adalah sebagai berikut :

- 1). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria sangat aktif, jika nilai indeksnya 101 - 125;
- 2). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria aktif, jika nilai indeksnya 76 - 100;
- 3). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria cukup aktif, jika nilai indeksnya 51 - 75;

- 4). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria tidak aktif, jika nilai indeksnya 26 - 50;
- 5). Partisipasi masyarakat lokal dalam kriteria sangat tidak aktif, jika nilai indeksnya 1 - 25.

Tahapan analisis adalah sebagai berikut :

1. Analisis masalah (*problem analysis*), yakni mengidentifikasi masalah-masalah dan sebab serta akibatnya berkenaan dengan suatu keadaan negatif yang ingin diperbaiki;
2. Analisis tujuan (*objective analysis*), yakni mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari terpecahkannya masalah-masalah;
3. Analisis alternatif (*Alternative analysis*), yakni mengidentifikasi dan mengkaji kemungkinan pilihan strategi yang dapat mendukung keberhasilan program (proyek).



## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kondisi Umum Taman Wisata Alam Gunung Meja

#### 4.1.1. Sejarah Kawasan

Menurut BBKSDA (2014) dan Manusawai dan Leonard (2015) upaya penetapan Hutan Gunung Meja sebagai kawasan lindung dimulai pada bulan Agustus 1953, yaitu saat kunjungan Tim Kehutanan Pemerintah Belanda yang terdiri atas: Ir. J.F.V. Zieck (Kepala Seksi Inventarisasi Hutan), Ir. J. Fokkinga (Ketua Komisi Pertanian) dan H. Schrijn (Kepala Pemangkuhan Hutan) ke Gunung Meja. Pada saat itu, telah disepakati areal hutan primer seluas 100 ha dan hutan sekunder seluas 360 ha termasuk jurang dan tebing-tebing karang yang ada untuk diusulkan sebagai hutan lindung Hidroorologi.

Dalam sejarah pengelolaan kawasan hutan Gunung Meja ada beberapa proses terkait perubahan status kawasan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Sejarah Kawasan

Tahun	Uraian	Legalitas
1950	Larangan melakukan penebangan di hutan Gunung Meja	Instruksi Kepala Pemangku Hutan
1953	Kunjungan Kepala Seksi Inventarisasi Hutan, Ketua Komisi Pertanian dan Kepala Pemangku Hutan Ke Gunung Meja	Kesepakatan Luas Areal yang diusulkan sebagai kawasan lindung, yaitu 360 ha.
1954	Pendaftaran Hutan Gunung Meja pada Ordonansi Perlindungan Tanah	Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1954
1957	Penetapan Hutan Gunung Meja sebagai Hutan Lindung dengan fungsi Hidroorologis seluas 358,50 Ha	Surat Keputusan Gubernur Netherland Nieuw Guinea Nomor 158 Tanggal 25 Mei 1957
1963	Hutan Gunung Meja sebagai Hutan Lindung Hidrologis telah berlaku dengan luasan 468,50 Ha	Surat Keputusan Gubernur Irian Barat Nomor 44/GIB/1963 tanggal 10 September 1963

1980	Hutan Lindung Gunung Meja dirubah menjadi Taman Wisata Alam dengan luas 500 Ha	Keputusan Menteri Pertanian No. 19/Kpts/Um.I/1980 tanggal 12 Januari 1980
2012	Taman Wisata Alam dengan luas 462,16 Ha	Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.91/Menhut-II/2012 tanggal 3 Februari 2012

---

Pada awalnya, pemerintah Belanda menetapkan Hutan Gunung Meja sebagai kawasan lindung dengan fungsi utama pengatur tata air (Hutan Lindung Hidrorologis). Perkembangan selanjutnya dengan mempertimbangkan letak dan jarak dengan pusat Kota Manokwari, sehingga dikembangkan aneka fungsi kawasan bagi masyarakat maupun lingkungan. Rencana fungsi pengembangan yang diprakarsai oleh pemerintah Belanda, antara lain :

1. Fungsi pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan;
2. Fungsi penelitian;
3. Taman Hutan/Botani Garden;
4. Tempat rekreasi untuk masyarakat kota Manokwari.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam rangka mendukung rencana pengembangan aneka fungsi kawasan hutan Gunung Meja (pada saat itu), sebagai berikut :

- 1 Kegiatan inventarisasi hutan primer dan menjelang awal tahun 1954 mencapai 100 Ha dan dilanjutkan pada tahun 1956 dan 1957 hingga mencapai 360 Ha.
- 2 Sejalan dengan kegiatan inventarisasi hutan, telah dilakukan survei tanah dan analisis vegetasi pada kawasan hutan Gunung Meja untuk jenis pohon yang berdiameter lebih dari 35 cm dengan intensitas sampling adalah 10 % oleh





pengenal jenis lokal Bapak Jance Ainusi dan seorang ahli Botani Belanda Ir. Faber.

- 3 Pada tahun 1956 dilakukan pemetaan areal hutan Gunung Meja seluas 360 Ha oleh Kantor Agraria Manokwari.
- 4 Sesuai rencana pengembangan fungsi kawasan yang dibuat oleh pemerintah, maka untuk mencapai semua tujuan pengembangan fungsi kawasan dibutuhkan areal seluas 700 hektar.

Realisasi pengelolaan kawasan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan, karena situasi politik yang mengharuskan Pemerintah Belanda untuk meninggalkan Nederland Neuw Guinea (Tanah Papua) sekitar tahun 1960-an. Pada tahun 1963, kewenangan pengelolaan kawasan Hutan Gunung Meja diserahkan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintah Provinsi Irian Barat dan selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Gubernur Irian Barat tahun 1963, maka kawasan ini dipertahankan sebagai kawasan lindung dengan fungsi utama adalah Hutan Lindung Hidrologis. Upaya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan pada saat itu terbatas pada pengamanan hutan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan. Tidak tersedianya data sehingga informasi pengelolaan hutan Gunung Meja dalam periode 1963 sampai 1980-an tidak dapat dideskripsikan, namun demikian pengelolaan tetap dilaksanakan oleh pemerintah yang bertumbuh pada fungsi kawasan sebagai hutan lindung.

Di era tahun 1980-an hutan lindung Gunung Meja dirubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Kpts/Um/I/1980. Sejak saat itu, kewenangan pengelolaan kawasan



yang tadinya pada Dinas Kehutanan dialihkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua II melalui Seksi Konservasi Wilayah I Manokwari. Perubahan fungsi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu kawasan hutan ini letaknya strategis dekat pusat kota Manokwari dan mudah diakses, memiliki nilai keindahan alam yang artistik dan situs sejarah bangsa. Selain hutan ini diharapkan akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan penambah devisa negara di sektor pariwisata selain sektor lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dengan adanya perubahan fungsi kawasan menjadi TWA Gunung Meja adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1982 dilakukan penataan batas kawasan oleh Sub Balai Planologi Kehutanan VI Maluku - Papua. Luas kawasan secara definitif 460,25 dengan panjang pal batas kawasan adalah 10,97 Km.
2. Tahun 1990 dilakukan rekonstruksi tata batas Kawasan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Manokwari dengan luasan dan panjang pal batas yang sama pula.
3. Kegiatan pembangunan home stay proyek kawasan lindung.
4. Kegiatan agroforestry dengan masyarakat di Kampung Ayambori.
5. Kegiatan pemeliharaan pal batas secara partisipatif dengan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak tahun 1980-an hingga saat ini belum ada yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan sesuai fungsinya sebagai Taman Wisata Alam (TWA). Kegiatan yang dilakukan hanya berupa upaya pengamanan hutan, penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat



sekitarhutan. Kecuali, pembangunan Tugu Jepang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari sebagai objek wisata sejarah atau situs sejarah perang dunia II dalam kawasan sebagai upaya memperkaya objek wisata sejarah.

Pada tahun 2012 kawasan TWA Gunung Meja melalui SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.91/Menhut-II/2012 kawasan ini tetap dipertahankan sesuai fungsinya, namun mengalami perubahan luas kawasan yaitu bertambah menjadi 462,16 Ha. Pengelolaan tetap saja dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya berdasarkan rencana pengelolaan yang direncanakan dengan tujuan mempertahankan eksistensi kawasan dengan mengoptimalkan fungsinya sebagai taman wisata alam.

#### **4.1.2. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Secara geografis kawasan TWA Gunung Meja terletak pada 134°03'17" - 134°04'05" Bujur Timur dan 0°51'29" - 0°52'59" Lintang Selatan. Luas kawasan ini 462,16 Ha dan terletak di tengah di kota Manokwari sehingga cukup strategis terhadap berbagai aktivitas kehidupan.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, TWA Gunung Meja berada pada 2 (dua) wilayah Pemerintahan Distrik (Kecamatan) yaitu Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Timur. Letak kawasan pada kedua distrik ini mencakup 5 wilayah Kelurahan masing-masing Kelurahan Amban, Kelurahan Padarni, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Manokwari Barat dan Kelurahan Pasir Putih.

Batas-batas wilayah TWA Gunung Meja mencakup wilayah sebagai berikut :



Sebelah Utara	: Pantai Laut Pasifik
Sebelah Selatan	: Kota Manokwari
Sebelah tenggara	: Kelurahan pasir putih
Sebelah Barat Laut	: Kelurahan Amban

#### 4.1.3. Iklim

Berdasarkan data iklim yang diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah V Stasiun Meteorologi Kelas III Manokwari selama 20 tahun terakhir (1997– 2016), diketahui bahwa kawasan TWA Gunung Meja seperti halnya wilayah tropis lainnya memiliki kondisi iklim yang baik guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan sumber daya alam. Jumlah curah hujan tertinggi di kawasan TWA Gunung Meja pada tahun 2002 yaitu 3.288 mm dan terendah pada tahun 2003 yaitu 122,42 mm. Rataan hari hujan berkisar antara 11,2 sampai 21,3 hari dengan intensitas hujan tertinggi pada tahun 1994 yaitu 17,97 mm/hari hujan dan terendah pada tahun 2008 dan 2010 masing-masing 7,2 mm/hari.

Suhu udara di kawasan TWA Gunung Meja dan sekitarnya berkisar antara 24,0°C sampai 27,53°C. Suhu udara tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 dan 2010 yaitu 27,3°C dan terendah pada tahun 2001 yaitu 27,0°C. Rataan kelembaban udara berkisar antara 81,17% sampai 84,25% dengan kelembaban udara tertinggi pada tahun 2001 sebesar 84,25% dan terendah pada tahun 2009 sebesar 81,17 %.

Data curah hujan bulanan yang ada selanjutnya ditabulasikan berdasarkan kriteria bulan basah, bulan sedang dan bulan kering sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Jumlah Bulan Kering, Bulan Lembab dan Bulan Basah di Kawasan TWA Gunung Meja dan Sekitarnya Selama 20 Tahun Terakhir (1997-2016)

Tahun	Bulan kering (<60 mm)	Bulan lembab (60 – 100 mm)	Bulan basah (>100 mm)
1997	2	2	8
1998	1	2	9
1999	1	2	9
2000	2	2	8
2001	1	2	9
2002	3	2	7
2003	3	3	6
2004	3	2	7
2005	0	2	10
2006	1	1	10
2007	0	0	12
2008	1	5	6
2009	2	2	8
2010	2	3	7
2011	3	4	5
2012	3	3	6
2013	2	2	8
2014	1	2	9
2015	0	2	10
2016	1	1	10
Jumlah	32	44	164
Rataan	1,60	2,20	8,20

Penentuan bulan basah dan bulan kering menggunakan kriteria Schmidt dan Fergusson (1951) dalam Sinery (2015) sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Asumsi dasar pengelompokkan ini yakni bahwa bulan kering adalah bulan dengan curah hujan <60 mm, bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan 60–100 mm, dan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan >100 mm. Perbandingan rata-rata bulan basah dengan bulan kering yang dinyatakan dalam % (nilai Q). Nilai Q tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :



$$Q = \frac{\text{Jumlah bulan kering}}{\text{Jumlah bulan basah}} \times 100\%$$
$$= \frac{32}{164} \times 100\% = 19,51\%$$

Gambaran tentang klasifikasi tipe iklim berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Fergusson dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Klasifikasi Tipe Iklim di TWA Gunung Meja Menurut Sistem Schmidt dan Fergusson

Tipe iklim	Nilai Q (%)
A	0 – < 15,3
<b>B</b>	<b>15,3 – &lt; 33,3</b>
C	33,3 – < 60
D	60 – < 100
E	100 – < 167
F	167 – < 300
G	300 – < 700
H	>700

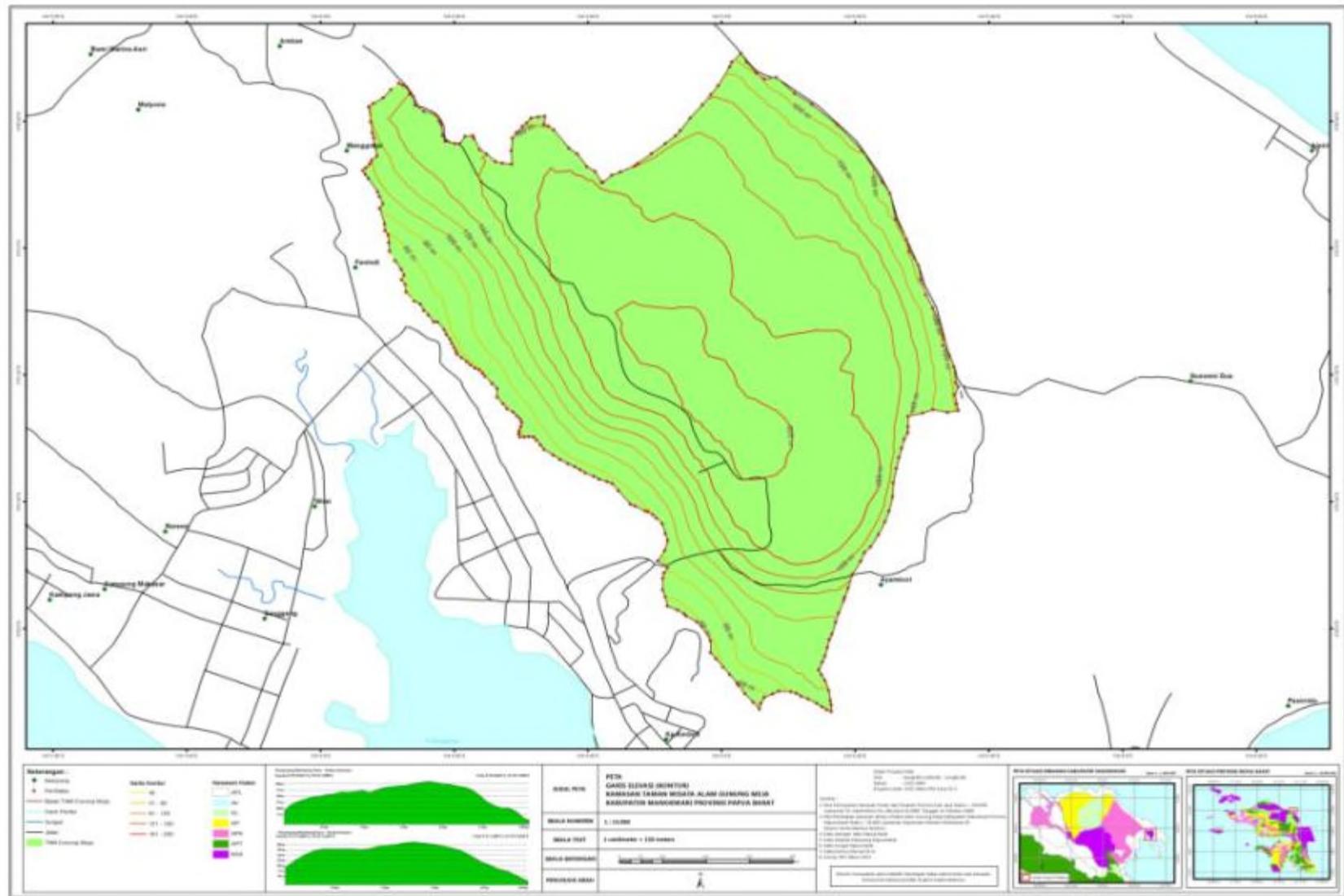
Berdasarkan hasil perhitungan jumlah curah hujan di atas, diketahui bahwa kawasan TWA Gunung Meja memiliki tipe iklim termasuk tipe iklim tropik basah dengan nilai  $Q = 15,3 - < 33,3$ .

#### 4.1.4. Topografi dan Kelerengan

TWA Gunung Meja berada pada ketinggian 16 - 210 m dpl dengan topografi lapangan bervariasi dari datar hingga bergelombang ringan ke arah timur dan bergelombang berat dari timur ke arah barat dengan puncak tertinggi (puncak Bonay) ±210 meter dpl. Pada sisi bagian selatan dan

utara terdapat beberapa tempat berupa tebing karang terjal dan lereng yang curam. Pada bagian puncak terdapat daerah yang relief yang kecil hampir datar menyerupai permukaan meja sehingga kawasan ini dinamakan Gunung Meja (*Tafelberg*). Fisiografi lahan dengan tebing karang terjal dan berteras pada sisi sebelah selatan ke barat laut kawasan merupakan wilayah penyebaran mata air.

Gambaran secara rinci tentang kawasan TWA Gunung Meja berdasarkan kondisi topografi dapat dilihat pada Gambar 4 berikut :



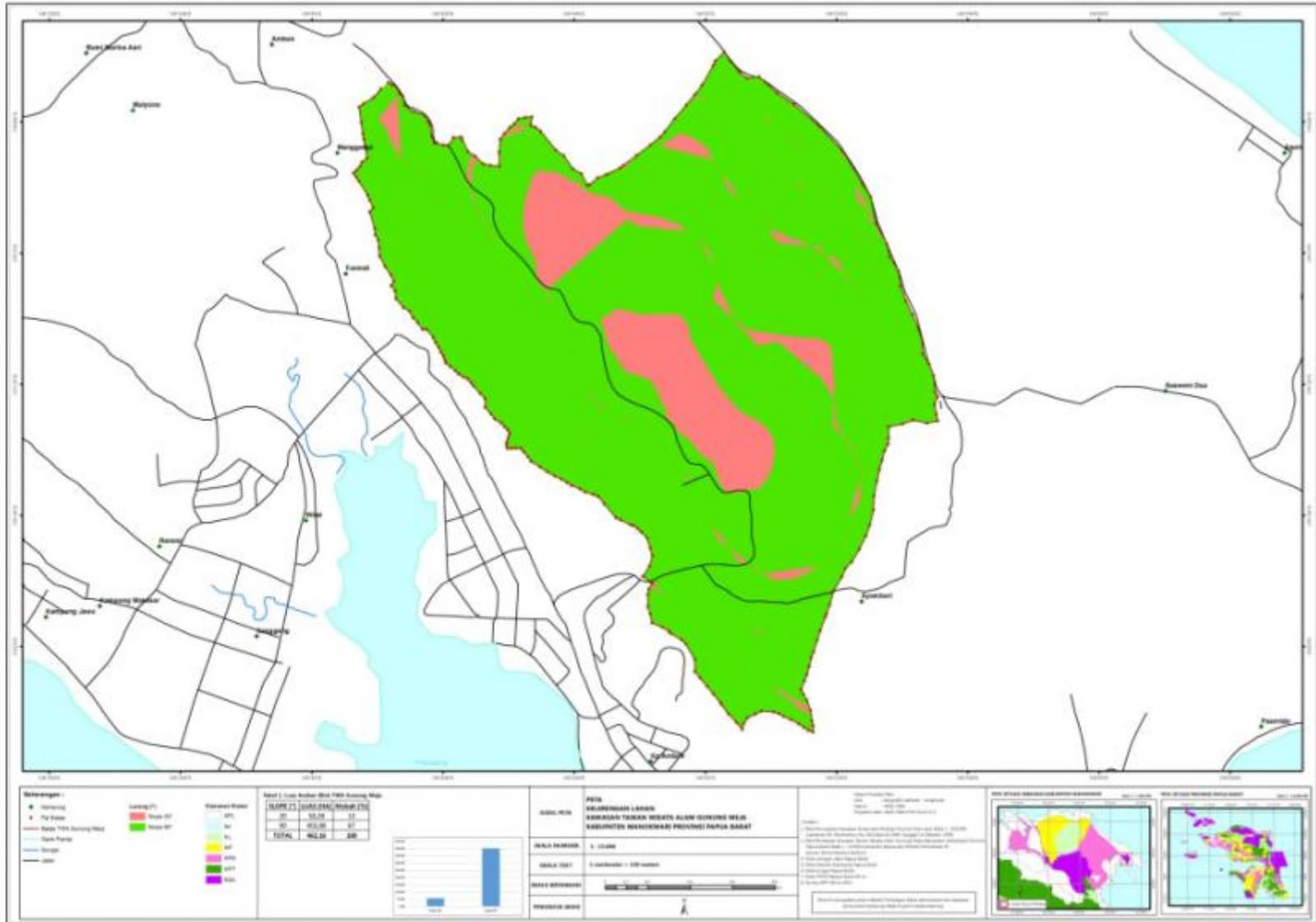
Gambar 4. Peta Topografi TWA Gunung Meja

@Hic  
 1. D  
 2. M



Kondisi areal TWA Gunung Meja memiliki kelas kelerengan datar (0-8%) sampai sangat curam (>40%). Menurut Peday (2009) kawasan TWA Gunung Meja memiliki kondisi fisiografi yang cukup bervariasi. Fisiografi tersebut mencakup wilayah berkelerengan 0 – 8% (datar) seluas 188,70 ha (41%), wilayah berkelerengan 8–15 % (landai) seluas 41,42 ha (9%), wilayah berkelerengan 15 – 25 % (agak curam) seluas 179,50 ha (39%), wilayah berkelerengan 25 – 40 % (curam) seluas 32,22 ha (7%) dan wilayah berkelerengan >40 % (sangat curam) seluas 4 ha (18,41%). Kelerengan wilayah berkisar antara datar sampai sangat curam.

Gambaran secara rinci tentang kawasan TWA Gunung Meja berdasarkan kondisi kelerengan dapat dilihat pada Gambar 5 berikut :



Gambar 5. Peta Kelereng TWA Gunung Meja





#### 4.1.5. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta geologi wilayah Manokwari kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Departemen Pertambangan Energi dan Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics, Departmen of Primary Industrial and Energy Australia diketahui bahwa kawasan TWA Gunung Meja dilalui Formasi Manokwari (Qpm) yang merupakan formasi batuan yang terdiri atas batugamping terumbu, kalsirudit, kalkarenit, dan batupasir, konglomerat breksi nakabahan, dan gampingan. Menurut Anonim (2000) dalam Liborang (2004) kawasan ini terdiri atas jenis batuan sedimen neogen dengan variasi tanah pasir dan tanah liat berpasir. Tanah pasir tanpa batu berwarna coklat kemerah-merahan, tanah liat berpasir dengan batu berwarna coklat kemerah-merahan, tanah liat berpasir di atas batuan karang berwarna coklat kemerah-merahan, tanah liat kemerah-merahan tanpa batu dan tanah kemerah-merahan dengan batu serta tanah liat kemerah-merahan di atas batu karang.

Dari jenis-jenis tersebut batu gamping merupakan sistem geologi yang menjadi pertimbangan lain nantinya dalam pengelolaan hutan ini sesuai Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456/20/MEM/2000 tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Kawasan Karst. Hal tersebut didasarkan pentingnya kawasan Karst sebagai ekosistem spesifik untuk eksistensi flora dan fauna spesifik.

Terkait dengan fungsi karbon, maka pelestarian ekosistem Karst merupakan pelestarian jasa lingkungan berupa penyerapan karbondisoksida di udara secara alami. Menurut Cahyadi (2000) bahwa proses penyerapan



karbondioksida diawali dengan larutnya karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ) di dalam air dan membentuk  $\text{H}_2\text{CO}_3$ . Sifat larutan  $\text{H}_2\text{CO}_3$  yang tidak stabil akan mudah terurai menjadi  $\text{HCO}_3^{2-}$  dan  $\text{H}^+$  dan  $\text{HCl}$   $\text{O}_3^-$ . Proses ini berlangsung dengan kesetimbangan reaksi kimia tertentu dan setiap pelarutan 1000 kg batugamping ( $\text{CaCO}_3$ ) pasti diikuti oleh penyerapan karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ) sebanyak 120 kg. Menurut Ko (2006) dalam Sinery (2013) ekosistem Karst sangat penting bagi kehidupan karena ekosistem ini berfungsi sebagai pemasok air bagi kebutuhan komponen lingkungan lainnya. Hal tersebut dipertegas laporan UN yang mengemukakan bahwa 25% persediaan air bagi kebutuhan penduduk dewasa ini dipasok dari sumber air karst.

Gambaran secara rinci mengenai sifat fisik tanah di bawah lima jenis tegakan hutan dan tanah kosong pada kedalaman 20 cm di kawasan TWA Gunung Meja dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sifat fisik Tanah pada Kawasan TWAGunung Meja

Jenis tegakan/ tutupan lahan	Fraksi			Klasifikasi tekstur tanah
	Pasir (%)	Debu (%)	Liat (%)	
<i>Calophyllum</i> sp.	5.93	43.93	50.14	Liat berdebu
<i>Koordersiodendron</i> sp.	0.83	51.64	47.53	Liat berdebu
<i>Palaquium</i> sp.	34.42	52.23	13.34	Lempung berdebu
<i>Tectona grandis</i>	5.16	61.18	33.66	Lempung liat berdebu
Hutan alam	4.98	83.47	12.54	Lempung berdebu
Tanah kosong	4.65	61.36	33.99	Lempung liat berdebu

Manusawai dan Leonard (2015)



Tanah di TWA Gunung Meja berdasarkan karakteristik tanahnya digolongkan kedalam empat jenis tanah dan umumnya memiliki lapisan atas (*top soil*) yang sangat tipis (< 30 cm). Tanah tersebut adalah tanah liat, tanah berkapur, tanah berbatu dan tanah berkarang. Perbedaan jenis tanah tersebut dinampakan pula oleh perbedaan vegetasi yang tumbuh di atasnya. Tekstur tanah pada kawasan hutan TWA Gunung Meja adalah lempung berliat, liat berdebu, lempung liat berdebu dan liat, dengan kandungan liat berkisar 27,58 – 61,18 %, debu 35,04– 52,97 % dan pasir 2,12 – 28,32 %. Tanah pada kawasan hutan TWA Gunung Meja bersifat agak masam (pH berkisar 5,94–6,56) sampai netral (pH berkisar 6,71–6,98), C-organik tersedia berkisar sangat rendah sampai tinggi, N-total tersedia berkisar sangat rendah sampai rendah, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> tersedia berkisar sedang sampai tinggi, Kapasitas Tukar Kation (KTK) tersedia berkisar rendah sampai sedang, Ca tersedia rendah sampai sedang, Mg tersedia berkisar sedang sampai tinggi, K tersedia berkisar rendah sampai sedang, Na tersedia berkisar rendah sampai sedang dan kejenuhan basa (KB) tersedia berkisar rendah sampai sedang. Berdasarkan sifat tanah tersebut, diketahui bahwa jenis tanah di kawasan ini tergolong jenis tanah marginal dengan tingkat kesuburan sangat rendah sampai sedang.

#### 4.1.6. Aksesibilitas

Perjalanan menuju lokasi TWA Gunung Meja tidak sulit karena mempunyai aksesibilitas yang cukup baik. Kebijakan pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas antara ibu kota

Kabupaten dengan daerah pedalaman sangat mendukung dalam mengakses di TWA Gunung Meja.

Lokasi TWA Gunung Meja dapat ditempuh melalui jalan darat, air dan udara. Saat ini transportasi darat menuju lokasi TWA Gunung Meja di Manokwari dari daerah pedalaman seperti Jakarta, Makassar dan Sorong menuju dapat ditempuh melalui pesawat udara atau kapal laut. Untuk transportasi udara dilakukan dengan peningkatkan prasarana bandara Rendani dengan telah beroperasinya maskapai penerbangan berbadan besar/jet seperti Wing Air, Expres Air, Sriwijaya, Garuda dan Batik Air.

Tidak terbatas saja pada peningkatan fasilitas pelabuhan udara, namun pembangunan perhubungan laut juga diprioritaskan untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan laut Manokwari. Pelabuhan Manokwari disinggahi oleh Kapal Pelni, yaitu KM. Labobar, KM. Sinabung, dan KM. Ngapulu. Banyaknya penumpang yang menggunakan transportasi dapat dijadikan acuan untuk memperkirakan jumlah wisatawan yang datang.

#### **4.1.7. Nilai Estetika**

Nilai estetika kawasan TWA Gunung Meja terbentuk atas perpaduan antara posisi kawasan terhadap kota Manokwari, karakteristik fisiografi lahan, keanekaragaman flora dan fauna serta nilai historis. Empat faktor tersebut bagi pemerhati dan pencinta alam adalah suatu keunikan yang mengandung nilai artistik alam yang penuh kerahasiaan dan keajaiban ciptaan Tuhan. Kota Manokwari memiliki keunggulan alami karena secara geografis mempunyai panorama dengan nilai keindahan alam yang sangat

unik. Terletak di sepanjang pantai Teluk Doreri dan dihiasi dua pulau kecil "Pulau Lemon dan Mansinam" di depannya. Selanjutnya pada bagian belakang kota di pagari hijauan pepohonan, tebing yang terjal dan curam membentuk suatu gugusan bukit yang indah (Gunung Meja). Apabila kita memandang lebih jauh ke arah Selatan sampai Barat Daya membentang pegunungan Arfak yang menjulang. Bentangan alam ini, baik berupa pulau di depan Teluk Doreri, jajaran pegunungan Arfak dan Gunung Meja merupakan kawasan penyangga (*Buffer zone*) Kota Manokwari terhadap kejadian dan gejala alam yang mungkin terjadi di alam semesta (Anonim, 2004 dalam Manusawai dan Leonard, 2015).

Kawasan Gunung Meja yang berbatasan langsung dengan wilayah kota Manokwari merupakan kepariwisataan yang cukup potensial. Keunggulan dan keunikan ini semakin diperkuat oleh karakteristik fisiografi lahan Gunung Meja yang melatarbelakangi kotamerupakan jajaran pegunungan elevasi tertinggi 110 meter di atas permukaan laut yang di beberapa sisinya ditutupi tebing yang terjal dan lereng yang curam menampilkan panorama alam yang indah. Panorama yang sama jika kita berada pada salah satu sisi tertinggi di kawasan sejauh mata memandang tampak panorama laut dengan pantai pasir putih dan pantai karang serta laut yang dikelilingi pegunungan. Nilai estetika tersebut akan lebih mengagumkan lagi bila dinilai dari tipe hutan, keanekaragaman serta keendemikan flora-fauna yang merupakan keterwakilan (holotype) tipe hutan tropis dataran rendah yang hampir dijumpai di sepanjang pantai utara



pulau New Guinea. Keunikan-keunikan tersebut menjadi daya tarik bagi penjelajah alam dan pemerhati lingkungan. Daya tarik ini akan semakin kuat apabila dipadukan dengan nilai sejarah yang terkandung dalam kawasan, karena Gunung Meja dapat menjadi saksi sejarah dari zaman Belanda, Jepang dan zaman Sekutu dalam masa penjajahan di tanah ini (Anonim, 2004 dalam Manusawai dan Leonard, 2015).

Potensi estetika tersebut yang menjadi dasar utama menetapkan Gunung Meja sebagai salah satu kawasan pelestarian alam di Manokwari dengan fungsi utama Wisata Alam. Keunggulan dan keunikan potensi alam inilah yang perlu dikembangkan untuk memperkaya nilai kepariwisataan sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah serta penunjang kebutuhan hidup masyarakat (Anonim, 2004 dalam Manusawai dan Leonard, 2015).

#### **4.1.8. Sosial Ekonomi Budaya**

Kawasan TWA Gunung Meja secara administratif berbatasan langsung dengan 4 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Amban, Kelurahan Padarmi, Kelurahan Manokwari Timur dan Kelurahan Pasir Putih. Diketahui bahwa jumlah penduduk di keempat kelurahan tersebut sampai tahun 2016 cukup potensial sebagaimana tercantum pada Tabel 7 berikut.



Tabel 7. Jumlah Penduduk di Sekitar TWA Gunung Meja

No.	Lokasi	Jumlah (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kelurahan Amban	1.134	4.536
2.	Kelurahan Pasir Putih	715	2.860
3.	Kelurahan Padarni	1.679	6.716
4.	Kelurahan Manokwari Timur	1.201	4.804
Total		4.729	18.916

Dari keempat kelurahan tersebut, terdapat sembilan kampung yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan kawasan ini, yaitu Amban, Ayambori, Aipiri, Anggori, Manggoapi, Fanindi, Brawijaya dan Kampung Ambon Atas. Etnik yang bermukim pada kampung-kampung tersebut umumnya campuran etnik asli Manokwari dan etnik pendatang. Etnik penduduk asli terutama dari suku Mole, Hatam, Sough dan Meyakh. Menurut Manusawai dan Leonard (2015) etnik pendatang atau urban yang berada di sekitar kawasan ini umumnya berasal dari Sorong, Biak, Serui serta dari Sulawesi, Ambon, Timur dan Sumatera dan Jawa.

Bentuk-bentuk interaksi di dalam dan di sekitar kawasan TWA Gunung Meja meliputi perladangan/kebun masyarakat, pengambilan kayu bakar, pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu, perburuan, pengambilan tanah (*top soil*), pengambilan batu, arang, pemukiman penduduk dan bangunan fisik lainnya.

Kawasan Gunung Meja berdasarkan filosofi budaya masyarakat Afrak, yaitu kelompok suku Hatam dan Suku Sough yang bermukim di sekitar kawasan, memandang Hutan Gunung Meja sebagai Ayamfos yang artinya dapur hidup. Ayamfos yang berarti Hutan Gunung Meja baik berupa

tanah, air dan hutan yang terkandung di dalam kawasan adalah sumber penghidupan masyarakat yang perlu dijaga, dilindungi dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dalam kehidupannya. Hutan Gunung Meja merupakan “Ayamfos” sebagai tempat berkebum, sumber protein nabati dan hewani dalam pemenuhan kehidupan masyarakat sehari-hari, sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat, tempat melakukan usaha-usaha ekonomi pertanian dan juga situs budaya “tanah larangan/tempat pamali bagi masyarakat (Manusawai dan Leonard, 2015).

Masyarakat yang bermukim di wilayah pemukiman Ayambori dan Fanindi sudah sangat paham akan pentingnya Hutan Gunung Meja sebagai sumber kehidupan mata air bagi kehidupannya. Berdasarkan filosofi budaya dan sumber mata air, terutama daerah hulu merupakan “tanah larangan” atau tempat pantangan (pamali) yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Namun perkembangan pembangunan berdampak terhadap kebutuhan lahan pertanian masyarakat di sekitar wilayah perkotaan menyebabkan kawasan ini telah dirambah, sehingga filosofi Hutan Gunung Meja telah terpolarisasi. Tanah larangan yang tidak boleh diganggu telah dimasuki oleh masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan lahan secara berlebihan dilakukan secara besar-besaran. Hutan gunung Meja sebagai Ayamfos sudah mulai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila upaya penyelamatan kawasan tidak dilakukan dengan baik, maka Hutan Gunung Meja tidak akan menjadi “Ayamfos”. Hutan Gunung Meja tidak akan lagi memberikan penghidupan



berupa sumber air dan hasil hutannya kepada masyarakat (Manusawai dan Leonard, 2015).

Kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya merupakan masyarakat subsisten dengan ekonomi rendah sampai sedang menjadikan ketergantungan terhadap sumber daya alam di kawasan hutan ini dan wilayah sekitar menjadi cukup tinggi. Kebutuhan pangan dipenuhi dari berladang, nelayan dan meramu hasil hutan. Masyarakat memanfaatkan berbagai sumber daya hutan seperti kayu, kulit kayu, daun, buah dan berbagai jenis sumber daya lainnya termasuk satwa liar. Masyarakat di sekitar kawasan ini umumnya mengembangkan pola-pola interaksi yang berkaitan dengan mata pencaharian dan pengelolaan lahan. Beberapa dari masyarakat di sekitar kawasan ini mengupayakan sistem pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Budaya masyarakat meliputi penerapan sistem bercocok tanam, upacara/kesenian adat, kepercayaan dalam peristiwa-peristiwa sakral, serta budaya gotong royong yang masih dilakukan. Acara adat masih dipertahankan dan dilaksanakan hingga saat ini. Pelaksanaan acara-acara tersebut terlihat misalnya melalui upacara perkawinan, kematian, penerimaan tamu dan lain sebagainya.

#### **4.2. Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan data hasil wawancara baik dengan masyarakat maupun BBKSDA Papua Barat khususnya Bidang KSDA Wilayah II Manokwari, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai tahun 2017 (Awal Juni 2017) ada 7 program atau kegiatan yang dilakukan oleh badan pengelola (BBKSDA Papua Barat) maupun mitra pengelola (para pihak terkait mencakup BPDAS

Remu-Ransiki, Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, BAPPEDA Kabupaten Manokwari, Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat, Perguruan tinggi, LSM dan masyarakat). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembangunan pagar batas kawasan, kegiatan penanaman jenis tanaman MPTS, kegiatan sosialisasi (sosialisasi fungsi kawasan dan pelopor revolusi mental), kegiatan monitoring kawasan dan kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran hutan, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2.



Gambar 6. Pagar Batas Kawasan yang dalam Pembangunannya Melibatkan Masyarakat

Dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TWA Gunung Meja pada fungsi partisipasi khususnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan baik yang dilakukan oleh BBKSDA Papua Barat melalui Bidang KSDA Wilayah II Manokwari maupun mitra KSDA dipengaruhi penilaian masyarakat terkait dampak keikutsertaan dalam program (sebagaimana dibahas secara rinci pada alasan masyarakat ikut berpartisipasi).



Gambaran secara rinci tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

TWA Gunung Meja pada fungsi partisipasi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Fungsi Partisipasi Masyarakat Kampung Ayambori dalam Program Pengelolaan TWA Gunung Meja

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Jumlah Responden	
		Ayambori	Persen (%)
1	Management	-	-
2.	Planning	2	5,13
3.	Implementation	4	10,26
4.	Maintenance	10	25,64
5.	Distribution / use	23	58,97
Jumlah responden berpartisipasi		39	95,12
Jumlah responden tidak berpartisipasi		2	4,88
Jumlah		41	100,00

Keterangan :

1. Keikutsertaan dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, memprakarsai tindakan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Keikutsertaan dalam manajemen program khususnya perencanaan kegiatan penanaman tanaman MPTS dan pemasangan pagar.
3. Keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan program penanaman tanaman MPTS dan pembangunan pagar batas kawasan
4. Keikutsertaan dalam mendukung keberhasilan program khususnya kegiatan monitoring kawasan (patroli rutin)
5. Pengguna program pengelolaan kawasan khususnya kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran dan sosialisasi

Data hasil penelitian sebagaimana terlihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak semua responden yang diwawancarai turut serta dalam pelaksanaan program pengelolaan TWA Gunung Meja. Hal ini menunjukkan perbedaan yang jelas bila dibandingkan dengan beberapa hal penelitian lainnya sebagaimana Mulyadi (2005), Sinery dan Manusawai (2016) atau Pattipi (2017). Menurut hasil penelitian Mulyadi (2005) sebanyak 100 dari 118 responden (84,74%) yang



diwawancarai turut berpartisipasi dalam pengelolaan program konservasi Hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto (HPBBS). Selanjutnya Sinery dan Manusawai (2016) yang menyebutkan bahwa hanya 41 responden (34,7%) berpartisipasi dalam pengelolaan hutan lindung Wosi Rendani dan sisanya 77 responden (65,3%) tidak berparticipasi. Hal sebaliknya dengan Pattipi (2017) yang menyebutkan bahwa masyarakat di Taman Wisata Alam Sorong 100% berpartisipasi dalam program pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola dan mitra karena status masyarakat ini yang merupakan komunitas binaan (Kelompok Tani Hutan Matoa), selain ada nilai manfaat dari partisipasi yang dilakukan terkait ekonomi keluarga.

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kampung Ayambori dalam pengelolaan kawasan TWA Gunung Meja berdasarkan fungsi partisipasi tertinggi pada fungsi distribusi/pengguna program dengan jumlah responden sebanyak 23 responden (58,97%). Fungsi tersebut terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran dan sosialisasi baik sosialisasi fungsi kawasan maupun sosialisasi terkait peningkatan pemahaman masyarakat terkait ketenteraman lingkungan. Selanjutnya fungsi partisipasi maintenance (pemeliharaan) dalam program pengamanan kawasan melalui monitoring kawasan (patroli rutin) dengan jumlah responden sebanyak 10 responden (25,64%). Fungsi implementasi yang terwujud dalam bentuk kegiatan penanaman tanaman MPTS dan pembangunan pagar batas kawasan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang (10,26%) dan fungsi partisipasi planning (perencanaan) melalui kegiatan perencanaan terkait lokasi dan tenaga kerja dalam



kegiatan penanaman tanaman MPTS dan pembangunan pagar pembatas kawasan dengan jumlah responden sebanyak 2 orang (5,13%). Fungsi perencanaan dimaksud pada konteks ini adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan lokasi penanaman, pemilihan jenis tanaman, penentuan batas lokasi pembangunan pagar dan tenaga kerja. Selanjutnya untuk fungsi partisipasi manajemen tidak diidentifikasi/dijumpai adanya fungsi ini seperti halnya yang diidentifikasi/dijumpai pada fungsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program konservasi Hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto (Mulyadi, 2005) atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Sorong (Pattipi, 2017).

Fungsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Gunung Meja terkonsentrasi pada fungsi distribusi pengguna program khususnya kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran dan sosialisasi yang menunjukkan persamaan bentuk fungsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program seperti halnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung Wosi Rendani yang menunjukkan konsentrasi responden pada fungsi distribution / use dan implementation (Sinery dan Manusawai, 2016). Hal tersebut diduga terkait fokus kegiatan pengelolaan yang bukan merupakan lokasi implementasi program dan kondisi masyarakat yang bukan terbentuk karena minat usaha/kegiatan seperti halnya kelompok tani hutan, sehingga pengelolaan program lebih merata dan melibatkan semua anggota kelompok tani. Menurut Pattipi (2017) Kelompok Tani Hutan Matoa Kampung Klasaman merupakan masyarakat yang terbentuk karena persamaan kepentingan akan pengelolaan program yang umumnya dibangun dari



suatu perencanaan secara bersama sampai pada pelaksanaan dan bahkan sampai evaluasi bersama badan pengelola.

Karakteristik masyarakat juga diduga mempengaruhi partisipasi, yang mana masyarakat Kampung Ayambori merupakan penduduk lokal yang umumnya berasal dari Suku Arfak, sehingga memiliki karakter pengelolaan sumberdaya alam yang cenderung sama (terbatas pada ikut serta dalam program tetapi tidak ada upaya menyusun program). Kondisi tersebut ditambah belum adanya harmonisasi perencanaan kegiatan pengelolaan antar pihak terkait pengelolaan kawasan, selain TWA Gunung Meja bukan merupakan fokus kegiatan pengelolaan khususnya pemberdayaan masyarakat sesuai arahan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017. Menurut Sallatang (1987) dalam Sutrisno (2004) dalam penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan, pada tahap pelaksanaan masyarakat relatif berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk, antara lain yang penting adalah; mengikuti penerangan, menjadi peserta obyek dan memanfaatkan keuntungan ekonomi. Namun biasanya jumlah warga yang berpartisipasi belum memadai. Disisi lain, pada tahap perencanaan dan penilaian pada umumnya masyarakat tidak berpartisipasi dengan alasan tidak dilibatkan.

Gambaran secara rinci tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Gunung Meja yang terwujud melalui intensitas partisipasi dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :



Tabel 9. Intensitas Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan TWA Gunung Meja

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Jumlah Responden	Persen (%)
1.	Total Control	0	0,00
2.	Initiation Action	2	5,13
3.	Decision Making	4	10,26
4.	Consultation	18	46,15
5.	Informing	15	38,46
Jumlah responden berpartisipasi		39	95,12
Jumlah responden tidak berpartisipasi		2	4,88
Jumlah		41	100,00

Keterangan:

1. *Pengendalian keseluruhan, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan demi kesuksesan program.*
2. *Memprakarsai tindakan, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam bentuk inisiatif tindakan demi terlaksananya program pengelolaan*
3. *Pengambilan keputusan, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam menentukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam program;*
4. *Memberikan konsultasi, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul berkenaan dengan program pengelolaan;*
5. *Memberikan informasi, adalah partisipasi unsur masyarakat dalam penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan program pengelolaan;*

Data pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan TWA Gunung Meja berdasarkan intensitas partisipasi tidak mencakup semua bentuk partisipasi khususnya bentuk total control (pengendalian keseluruhan) sebagaimana yang dijumpai pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Sorong (Pattipi, 2017). Partisipasi masyarakat Kampung Ayambori dalam program pengelolaan kawasan TWA



Gunung Meja berdasarkan intensitas partisipasi tertinggi pada intensitas partisipasi dalam memberikan pelayanan konsultasi dengan jumlah responden sebanyak 18 responden (46,15%).Selanjutnya diikuti informing (partisipasi dalam memberikan pelayanan informasi) dengan jumlah responden sebanyak 15 responden (38,46%), decision making (partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti penentuan jenis tanaman, lokasi penanaman tanaman MPTS, pagar pembatas kawasan) sebanyak 4 responden (10,26%), sedangkan intensitas partisipasi terendah sebanyak 2responden (5,13%) pada bentuk partisipasi initiation action (partisipasi masyarakat dalam memprakarsai tindakan). Terdapat sebanyak 2 responden (4,88%)dari 41 responden yang diwawancarai tidak turut berpartisipasi dalam program pengelolaan, baik menurut fungsi maupun intensitas. Kedua responden yang tidak turut berpartisipasi berdasarkan hasil wawancara adalah tergolong dalam kelompok pemuda usia sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan karena rutinitas sebagai anak sekolah, sehingga pada saat pelaksanaan program mereka tidak memiliki waktu untuk mengikutinya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam intensitas partisipasi terdistribusi pada intensitas partisipasi memberikan konsultasi (Consultation). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada masyarakat yang berada pada intensitas partisipasi pengendalian keseluruhan (total control), namun dalam pelaksanaan program pengelolaan sudah ada beberapa masyarakat yang berupaya untuk melakukan partisipasi dengan memberikan konsultasi dan informasi terkait kondisi dan potensi kawasan. Hal ini misalnya terlihat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring kawasan (patroli rutin) dan sosialisasi



dengan memberikan konsultasi terkait program dan informasi posisi dan kondisi pal batas, lokasi perambahan dan lokasi lainnya.

Kondisi tersebut terlihat sama dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung Wosi Rendani dan sebaliknya berbedadengan bentuk intensitas partisipasi masyarakat pada Hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto (Mulyadi, 2005) atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Sorong (Pattipi, 2017), yang sebenarnya memiliki kesamaan dalam hal program pengelolaan yang lebih cenderung sama dalam hal implementasi program pengelolaan bila dibandingkan dengan pengelolaan program pada hutan lindung Wosi Rendani (Sinery dan Manusawai, 2016). Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang terbentuk sebagai komunitas petani dalam administrasi pemerintahan, juga adanya fokus penyelenggaraan program yang tidak mencakup kawasan TWA Gunung Meja.

#### **4.2.1. Fungsi dan Intensitas Partisipasi Berdasarkan Unsur Masyarakat**

Berdasarkan hasil analisis /tabulasi diketahui bahwa fungsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Gunung Meja tidak berada pada semua fungsi dan intensitas partisipasi, yang merupakan akumulasi partisipasi masing-masing unsur masyarakat sebagaimana terlihat pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Fungsi dan Intensitas Partisipasi Unsur Masyarakat Dalam Pengelolaan TWA Gunung Meja

Bentuk Partisipasi	Responden					Jumlah
	Pemimpin	Minat	Kepala Keluarga	Ibu Rumah Tangga	Pemuda	
Management	-	-	-	-	-	-
Planning	2	-	-	-	-	2
Implementation	-	2	2	-	-	4
Mainaintenance	-	2	8	-	-	10
Distribution	-	-	8	8	7	23
Jumlah	2	4	18	8	7	39
Persen (%)	5,13	10,26	46,15	20,51	17,95	100,00
Total Control	-	-	-	-	-	0
Initiation Action	-	2	-	-	-	2
Decision Making	2	2	-	-	-	4
Consultation	-	-	18	-	-	18
Informing	-	-	-	8	7	15
Jumlah	2	4	18	8	7	39
Persen (%)	5,13	10,26	46,15	20,51	17,95	100,00

Data tabulasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi unsur masyarakat dalam pengelolaan TWA Gunung Meja tertinggi pada kelompok keluarga yang terdiri atas (18 responden atau 46,15%) dan terendah adalah kelompok pemimpin (2 responden atau 5,13%). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa unsur kepala keluarga merupakan unsur yang lebih banyak berpartisipasi dalam program pengelolaan dibandingkan dengan unsur keluarga lainnya. Data tersebut juga secara tidak langsung menggambarkan jumlah responden yang berkorelasi positif dengan bentuk partisipasi walaupun secara kuantitas



tidak terlihat korelasi positif antara unsur masyarakat, fungsi dan intensitas partisipasi. Menurut Sinery dan Manusawai (2016) masing-masing unsur keluarga memiliki fungsi dan peran yang berbeda sehingga akan memberikan respon yang berbeda terhadap inovasi atau program walaupun hirarki umum dalam masyarakat telah banyak menggambarkan tingkatan peran dan fungsi unsur masyarakat.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa baik pada fungsi partisipasi maupun intensitas partisipasi unsur kepala keluarga merupakan kelompok yang paling banyak berpartisipasi dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja yang menunjukkan kondisi normal dalam stratifikasi sosial masyarakat. Menurut Sardjono (2004) kelompok keluarga dalam hal ini kepala keluarga merupakan anggota keluarga yang paling pertama menerima inovasi selanjutnya akan terlibat dalam pengelolaan inovasi. Menurut Sinery (2013) dan Sinery dan Manusawai (2016) walaupun ada perbedaan dalam akses terhadap sumber daya alam, namun kepala keluarga menjadi tumpuan utama masyarakat dalam menerima suatu inovasi/program/kegiatan yang selanjutnya diimplementasikan. Disebutkan lebih jauh bahwa kondisi ini menjadi karakter masyarakat yang masih menggantungkan kehidupannya terhadap sumber daya alam.

a. Unsur Masyarakat Unsur Pemimpin.

Data hasil tabulasi pada Tabel 10 partisipasi unsur masyarakat pemimpin yang didata sebanyak 2 responden dan sesuai sistem sosial masyarakat kampung Ayambori ditetapkan unsur pemimpin dalam

penelitian ini adalah aparat Pemerintahan Kampung (Kepala Kampung) dan Kepala Distrik. Unsur masyarakat ini seperti halnya Kepala Suku memiliki kemampuan yang baik dalam mengarahkan masyarakat sehingga menjadi panutan dalam program pengelolaan khususnya implementasi program kegiatan.

Data tabulasi pada Tabel 10 menunjukkan, bahwa unsur masyarakat pemimpin yang berpartisipasi dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja sebanyak 2 responden (5,13%) dengan bentuk fungsi partisipasi “planning/berpartisipasi dalam perencanaan program”, demikian halnya pada intensitas partisipasi yang berada pada intensitas partisipasi “initiation action”/berpartisipasi dalam memprakarsai tindakan.

Fungsi partisipasi pemimpin yang berada pada fungsi planning/berpartisipasi dalam perencanaan program bukan merupakan bentuk implementasi perencanaan secara mandiri tetapi “sangat terbatas pada keikutsertaan dalam memberikan arahan pelaksanaan program”. Misalnya partisipasi unsur pemimpin ketika memberikan arahan terkait penentuan lokasi, jenis tanaman MPTS yang akan ditanam, dan lokasi pembangunan yang akan dibangun pagar pembatas. Meskipun bentuk perencanaan sesungguhnya konsep dasar partisipasi mengarah pada kemampuan untuk merencanakan kegiatan yang merupakan inisiatif pribadi maupun kelompok atau unsur (Sinery dan Manusawai, 2016), namun demikian bentuk partisipasi tersebut sudah cukup baik karena masih ada keterlibatan unsur masyarakat khususnya pemimpin dalam

perencanaan program. Menurut Margiyono (1999) Lurah (Kepala Kampung) selaku pemimpin di Kelurahan (Kampung) bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya Kepala Kampung dalam menjalankan tugas harus mensukseskan setiap program pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya Tokoh Masyarakat juga seperti Guru, Guru Jemaat dan Tokoh Adat yang memiliki karismatik pemimpin sehingga selalu dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan. Tokoh Masyarakat selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan, sehingga setiap program pembangunan mendapat dukungan dari masyarakat melalui peran penguatan yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat.

b. Unsur Masyarakat Kelompok Minat.

Data hasil tabulasi sebagaimana terlihat pada Tabel 10 menunjukkan bahwa kelompok minat yang terlibat dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja sebanyak 4 responden yang umumnya berprofesi sebagai Petani (sama dengan unsur Kepala Keluarga), tetapi dapat dikelompokkan tersendiri berdasarkan lahan usaha (rata-rata 2 ha) dan motivasi kegiatan pertanian (pasar). Jenis komoditi yang dikembangkan berupa sayur-sayuran dan pisang. Partisipasi unsur masyarakat kelompok minat pada program pengelolaan TWA Gunung Meja difokuskan pada fungsi partisipasi “implementation/pelaksanaan program” sebanyak 2 responden dan (50%) dan fungsi partisipasi “maintenance”/pemeliharaan sebanyak 2 responden (50%). Selanjutnya intensitas partisipasi unsur masyarakat kelompok minat pada intensitas partisipasi “memprakarsai

tindakan atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan” sebanyak 2 responden (50%). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kelompok minat yang diduga akan memiliki indek/nilai pada fungsi dan intensitas partisipasi yang tinggi ternyata tidak demikian, karena unsur ini lebih cenderung melakukan kegiatan pertanian dan penjualan hasil pertanian dibandingkan mengikuti program yang dilakukan pihak pengelola. Hal ini menjadi karakter unsur masyarakat di TWA Gunung Meja yang jelas berbeda misalnya dengan karakter masyarakat di TWA Sorong (Pattipi, 2017) yang terbentuk karena minta utama masyarakat sebagai kelompok tani hutan melalui pembinaan BBKSDA Papua Barat.

Unsur masyarakat kelompok minat merupakan unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan program. Menurut Margiono (1999) unsur masyarakat kelompok minat merupakan unsur dari masyarakat yang berpartisipasi secara aktif pada program pembangunan karena kelompok minat umumnya lebih dekat dengan program yang dilakukan atau diminati. Kelompok minat umumnya sebagai suatu organisasi yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri mestinya keberadaannya dapat dijadikan penggerak bagi keberhasilan suatu program. Namun kenyataan di lapangan sering terjadi kelompok minat terbentuk secara tidak alami, tetapi lebih karena untuk persyaratan tertentu.

c. Unsur Masyarakat Kepala Keluarga.

Data hasil tabulasi sebagaimana terlihat pada Tabel 10 menunjukkan, bahwa partisipasi unsur masyarakat Kepala Keluarga pada

program pengelolaan TWA Gunung Meja pada fungsi partisipasi sebanyak 2 responden (11,1%) yang berperan aktif pada fungsi partisipasi “pelaksanaan kegiatan”, selanjutnya sebanyak 8 responden (44,4%), berpartisipasi pada fungsi partisipasi “perbaikan/pemeliharaan” dan sebanyak 8 responden (44,4%), berpartisipasi pada fungsi partisipasi distribusi atau pengguna program. Selanjutnya intensitas partisipasi unsur masyarakat Kepala Keluarga terdistribusi hanya pada satu bentuk partisipasi yaitu memberikan konsultasi dengan jumlah responden sebanyak 18 responden (100%) atau semua responden unsur kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa unsur masyarakat Kepala Keluarga lebih monoton pada satu bentuk partisipasi mengingat bahwa karakter masyarakat yang merupakan penduduk lokal yang secara prinsip hanya mengikuti program atau kegiatan yang ditawarkan oleh pengelola atau tanpa upaya mengembangkan program pengelolaan yang bersiat mandiri. Hal ini menjadi argumentasi dasar mengingat belum optimalnya manajemen kolaborasi karena belum dilakukannya harmonisasi program kegiatan pengelolaan. Selanjutnya ada anggapan dari masyarakat bahwa mengingat hak ulayat kawasan TWA Gunung Meja sudah dibayar oleh pemerintah dan pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak mau masuk dalam kawasan (dalam arti tidak mau mengganggu kawasan yang telah menjadi milik pemerintah).

Telah dideskripsikan sebelumnya bahwa Kepala Keluarga (kelompok rumah tangga) merupakan unsur masyarakat terbesar yang

berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan dibandingkan unsur masyarakat lainnya. Partisipasi aktif dari keseluruhan kelompok rumah tangga dalam setiap program pembangunan merupakan prasyarat bagi keberhasilan penyelenggaraan program. Hal tersebut karena kelompok keluarga merupakan basis terdepan dalam struktur masyarakat yang memungkinkan terlaksananya program. Menurut Margiono, (1999) bahwa kelompok pemimpin rumah tangga merupakan kelompok yang berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan dan dalam berbagai hal sehingga selalu dilibatkan.

d. Unsur Masyarakat Wanita (Ibu Rumah Tangga).

Data hasil tabulasi sebagaimana terlihat pada Tabel 10, menunjukkan bahwa fungsi partisipasi unsur masyarakat wanita (ibu rumah tangga) pada program pengelolaan TWA Gunung Meja hanya mencakup satu bentuk fungsi partisipasi seperti halnya unsur pemimpin. Partisipasi unsur ibu rumah tangga sebanyak 8 responden (100%) berperan pada fungsi partisipasi “distribusi atau sebagai pengguna program pengelolaan”. Demikian halnya dengan intensitas partisipasi unsur ibu rumah tangga pada intensitas partisipasi hanya terfokus (8 responden /100%) pada intensitas partisipasi “memberikan informasi”. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kaum ibu rumah tangga belum ada upaya untuk terlibat secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan karena perbedaan pemahaman yang umumnya mendasari pengelolaan sumberdaya alam sesuai pandangan masyarakat terkait kawasan, selain

persepsi masyarakat tentang hak perusahaan kawasan yang menjadi hak pemerintah setelah adanya pembayaran hak ulayat.

Partisipasi unsur masyarakat wanita dalam hal ini unsur ibu rumah tangga dalam program pembangunan khususnya pada program pengelolaan (perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta pemberdayaan masyarakat) TWA Gunung Meja merupakan salah satu unsur penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program konservasi. Walaupun tampak bahwa partisipasi yang diberikan masih terfokus pada 1 bentuk kegiatan, namun melalui sosialisasi dan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat lebih meningkatkan partisipasi unsur masyarakat dalam program pengelolaan kawasan.

e. Unsur Masyarakat Pemuda.

Data hasil tabulasi sebagaimana terlihat pada Tabel 10, menunjukkan bahwa fungsi partisipasi unsur masyarakat pemuda pada program pengelolaan TWA Gunung Meja seperti halnya unsur pemimpin dan unsur ibu rumah tangga hanya terfokus pada 1 bentuk fungsi partisipasi. Partisipasi unsur masyarakat pemuda dalam program pengelolaan kawasan konservasi ini sebanyak 7 responden (100%) berperan dalam fungsi partisipasi distribusi atau pengguna program pengelolaan. Demikian halnya dengan intensitas partisipasi unsur pemuda hanya terfokus pada 1 bentuk partisipasi. Partisipasi masyarakat unsur pemuda sebanyak 7 responden (100%) berpartisipasi pada intensitas partisipasi “memberikan informasi. Kondisi tersebut menggambarkan

bahwa unsur pemuda seperti halnya unsur ibu rumah tangga dan pemimpin belum ada upaya untuk terlibat secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan seperti halnya unsur pemimpin. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman yang umumnya mendasari pengelolaan sumberdaya alam sesuai pandangan masyarakat terkait kawasan, selain persepsi masyarakat tentang hak pengusahaan kawasan yang menjadi hak pemerintah setelah adanya pembayaran hak ulayat. Walaupun demikian, dengan optimalisasi pengelolaan melalui sosialisasi dan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat lebih meningkatkan partisipasi unsur masyarakat dalam program pengelolaan kawasan TWA Gunung Meja.

Kelompok pemuda merupakan salah unsur penting seperti unsur masyarakat lainnya yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan. Menurut Soelaeman (1998) peranan pemuda dalam masyarakat dan bangsa telah digariskan dalam GBHN, satu diantaranya adalah generasi muda (pemuda) merupakan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Menurut Sinery dan Manusawai (2016) unsur pemuda merupakan unsur penggerak penyelenggaraan program bila dikelola secara baik dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya disebutkan lebih jauh bahwa bila unsur pemuda tidak dikelola secara baik (dalam hal ini proses pendampingan dan sosialisasi) maka pemuda cenderung pasif dan kurang terlibat dalam penyelenggaraan program pengelolaan.



Upaya mewujudkan keberhasilan program pengelolaan secara berkelanjutan, maka pemuda harus dijadikan salah satu pelaku pembangunan. Partisipasinya dalam program pembangunan akan mengantarkan pada kesinambungan pembangunan, karena di dalamnya akan terjadi proses pengenalan, pembelajaran dan pemahaman dari segala sesuatu yang terkait dengan program dan akan membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini juga yang diduga berlaku pada partisipasi unsur pemuda dalam hubungannya dengan pengelolaan TWA Gunung Meja.

#### 4.2.2. Tingkat Partisipasi dan Persepsi Unsur Masyarakat

##### 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

###### a. Unsur Masyarakat Pemimpin

Data hasil tabulasi sebagaimana terlihat pada Tabel 10, diketahui bahwa keseluruhan unsur masyarakat pemimpin yang berpartisipasi sebanyak 2 responden (100%) pada fungsi partisipasi “perencanaan”, dengan intensitas partisipasi 2 responden (100%) pada bentuk partisipasi “pengambilan keputusan”. Jika ditabulasi dalam tabel “*Participation Empowerment Index*”, maka diperoleh tingkat partisipasi unsur pemimpin sebesar, yakni  $1 \times 4 \times 3 = 12$  yang menunjukkan bahwa partisipasi pemimpin dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja termasuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (pada rentang nilai 1 - 25).

b. Unsur Masyarakat Kelompok Minat

Fungsi partisipasi masyarakat unsur minat pada program pengelolaan TWA Gunung Meja adalah sebanyak 2 responden (50%) pada fungsi partisipasi “pelaksana program” dan 2 responden (50%) pada fungsi partisipasi “pemeliharaan/rehabilitasi”. Selanjutnya intensitas partisipasi masyarakat unsur minat sebanyak 2 responden (50%) pada intensitas “memprakarsai pelaksanaan kegiatan” dan 2 responden (50%) pada intensitas “pengambilan keputusan”. Jika ditabulasi dalam tabel “*Participation Empowerment Index*”, diperoleh tingkat partisipasi unsur kelompok minat  $2 \times 3 \times 4 = 24$  dan  $2 \times 2 \times 3 = 12$  yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat unsur minat dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja termasuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (pada rentang nilai 1 - 25).

c. Unsur Masyarakat Kepala Keluarga

Fungsi partisipasi unsur masyarakat Kepala Keluarga (kelompok rumah tangga) pada program pengelolaan TWA Gunung Meja sebanyak 2 responden (11,1%) pada fungsi partisipasi “pelaksanaan kegiatan”, 8 responden (44,4%) pada fungsi partisipasi “perawatan/pemeliharaan” dan 8 responden (44,4%) pada fungsi partisipasi “distribusi atau pengguna program pengelolaan”. Selanjutnya intensitas partisipasi unsur kepala keluarga secara keseluruhan 18 responden (100%) pada intensitas partisipasi “memberikan konsultasi”. Jika ditabulasi dalam tabel “*Participation Empowerment Index*”, diperoleh bahwa tingkat partisipasi



unsur masyarakat kepala keluarga yaitu  $3 \times 3 \times 2 = 18$  atau  $3 \times 2 \times 2 = 12$  atau  $3 \times 1 \times 2 = 6$ , sehingga partisipasi kelompok kepala keluarga dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja termasuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (pada rentang nilai 1 – 25).

d. Unsur Masyarakat Wanita (Ibu Rumah Tangga)

Partisipasi unsur masyarakat wanita (ibu rumah tangga) pada program pengelolaan TWAGunung Meja sebanyak 8 responden (100%) pada fungsi partisipasi “distribusi atau pengguna program”, dengan intensitas partisipasi sebanyak 8 responden (100%) pada intensitas partisipasi “memberikan informasi”. Jika ditabulasi dalam tabel “Participation Empowerment Index” diperoleh tingkat partisipasi unsur ibu rumah tangga sebesar  $4 \times 1 \times 1 = 4$ , sehingga tingkat partisipasi unsur masyarakat ibu rumah tangga dalam program TWA Gunung Meja masuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (berada pada rentang nilai 1 – 25).

e. Unsur Masyarakat Pemuda

Partisipasi unsur masyarakat pemuda dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja adalah sebanyak 7 responden (100%) pada fungsi partisipasi “memberikan pelayanan distribusi”. Selanjutnya pada intensitas partisipasi sebanyak 7 responden (100%) pada intensitas partisipasi “memberikan pelayanan informasi”. Jika ditabulasi dalam tabel “Participation Empowerment Index”, diperoleh bahwa tingkat partisipasi unsur masyarakat pemudayaitu  $4 \times 1 \times 1 = 4$ , sehingga partisipasi unsur

masyarakat pemuda dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja termasuk dalam kategori “sangat tidak aktif” (pada rentang nilai 1 – 25).

Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA Gunung Meja adalah sangat tidak aktif untuk semua unsur masyarakat. Dalam perspektif manajemen, kondisi tersebut akan berdampak terhadap tidak maksimalnya pencapaian tujuan pengelolaan bahkan dapat terjadi kegagalan. Menurut Margiono (1999), seluruh unsur masyarakat seharusnya terlibat secara aktif dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan karena tanpa keterlibatan (partisipasi) aktif masyarakat keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan sangat tidak mungkin dicapai, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dan bahkan kegagalan bagi pembangunan itu sendiri. Menurut Sinery dan Manusawai (2016) kondisi ideal yang diharapkan dalam pengelolaan program melalui manajemen kolaborasi adalah aktif sampai sangat aktif karena pada kondisi menggambarkan pemberdayaan masing-masing unsur masyarakat terhadap program.

## **2. Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi**

Keberhasilan atau kesuksesan pelaksanaan atau implementasi program pengelolaan TWA Gunung Meja sangat dipengaruhi tingkat adopsi /penerimaan program oleh masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan proses adopsi umumnya terlihat dari berpartisipasi dan tidak berpartisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan.

Secara umum ada perbedaan pandangan, penilaian dan tanggapan antara masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja. Masyarakat berpandangan bahwa : (1) partisipasi adalah merupakan peran serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan. Menurut Slamet (1994), berdasarkan cara keterlibatannya partisipasi langsung terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan di dalam proses partisipasi. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya; (2) Partisipasi adalah ikut terlibat dalam berbagai tahap kegiatan pembangunan. Selanjutnya menurut Slamet (1994), merupakan pandangan yang didasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap pembangunanyang terencana. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa ada 6 (enam) tahap proses dalam pembangunan, yaitu : (1) perumusan tujuan; (2) penelitian; (3) persiapan rencana; (4) penerimaan rencana; (5) pelaksanaan dan(6) penilaian. Disebut partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tak langsung terlibat dalam dalam seluruh tahapan(6 tahap), dan disebut partisipasi sebagian, bila seseorang baik secara langsung maupun tak langsung seseorang terlibat dalam sebagian tahapan dari 6 tahapan tersebut.

Selain itu, ada pandangan bahwa partisipasi adalah sumbangan yang bersifat moril dan material, yang menurut Kartodirdjo (1988), partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan, sebagai sumbangan atau kontribusi (*counterfund*) masyarakat kepada proyek pemerintah. Hal ini menjadi tren dalam

kalangan beberapa kelompok masyarakat sebagaimana dikemukakan Sinery dan Manusawai (2016), yaitu bahwa ada kecenderungan partisipasi itu menjadi sangat aktif ketika ada keuntungan secara konkrit dari suatu inovasi atau program dan kegiatan yang dilakukan.

### 3. Faktor Penentu Partisipasi Masyarakat

Secara keseluruhan dalam implementasi program pengelolaan TWA Gunung Meja terdapat berbagai pendapat mengapa masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Faktor Penentu Partisipasi Masyarakat

No	Faktor Penentu Partisipasi	Frekuensi	Persen (%)
1.	Kewajiban, tanggung jawab dan rasa memiliki	11	28,2
2.	Dilibatkan Pengelola	9	23,1
3.	Memperoleh Upah Kerja	19	48,7
Jumlah		39	100

Data pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk memperbaiki atau memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi). Sebagian besar responden (19 responden/48,7%) menyatakan bahwa motivasi untuk memperoleh upah merupakan hal mendasar dalam partisipasi masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh pengelola atau mitra pengelola.



Persepsi masyarakat yang dikembangkan atas kesadaran / masyarakat relatif lebih rendah (9 responden/23,1%). Kondisi ini bukan menunjukkan rendahnya persepsi atau partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan, tetapi ada pemahaman bahwa kawasan TWA Gunung Meja telah dibayar oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak akan ikut mengelola (memanfaatkan) yang tentunya merupakan hal positif dalam upaya menjaga eksistensi kawasan, sehingga perlu peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep partisipasi dan upaya menciptakan partisipasi yang muncul sebagai inisiatif masyarakat. Hal tersebut sesuai pendapat Sallatang (1987) di Sulawesi Selatan, dimana diantara masyarakat yang tidak berpartisipasi atau rendah partisipasinya mengemukakan alasan antara lain; tidak diajak, sibuk dengan pekerjaan, tidak tahu, tidak memiliki kemampuan dan tidak mendapat keuntungan. Bagi masyarakat yang turut berpartisipasi dipengaruhi adanya sosialisasi, diajak, diberi kepercayaan, merasa memiliki, tanggung jawab dan mendapat upah.

#### **4. Persepsi Masyarakat Tentang Keinginan Berpartisipasi**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang keinginan atau kemauan untuk turut berpartisipasi dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja dipengaruhi oleh adanya kegiatan sosialisasi dan keterbukaan pengelola dan mitra pengelola untuk melibatkan masyarakat dalam program khususnya pelaksanaan program, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel 12. Persepsi Masyarakat Tentang Kemauan Berpartisipasi

No	Persepsi Masyarakat Tentang Kemauan Berpartisipasi	Jumlah	Persen (%)
1.	Keterbukaan Pengelola dan Mitra untuk dilibatkan	11	28,2
2.	Sosialisasi	22	56,4
3.	Penyuluhan dari instansi terkait	6	15,4
Jumlah		39	100

Persepsi atau respon masyarakat terkait pertanyaan yang diajukan terkait alasan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi didasari tiga hal sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Pada prinsipnya masyarakat menginginkan adanya sosialisasi dan keterbukaan dari pengelola dan mitra pengelola untuk dilibatkan dalam program terutama program pemberdayaan masyarakat. Program dimaksud misalnya penanaman bibit sayuran dan tanaman buah-buahan (MPTS). Masyarakat menginginkan keterlibatan secara baik terkait perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi penyelenggaraan program. Menurut Margiyono (1999), dalam pelaksanaan program pendekatan yang digunakan adalah “*top down approach*” yang memandang masyarakat sebagai obyek pembangunan yang harus dipertimbangkan.

#### 4.2.3. Permasalahan, Tujuan dan Alternatif Upaya Mendukung Program

##### Pengelolaan TWA Gunung Meja

###### 1. Permasalahan

Beberapa permasalahan penting di kawasan TWA Gunung Meja adalah sebagai berikut :

- a). Pada beberapa lokasi pada TWA Gunung Meja telah dirambah dan dimanfaatkan untuk pemukiman, jalan dan kegiatan pertanian masyarakat yang berdampak terhadap eksistensi kawasan.
- b). Akses untuk masuk ke dalam kawasan adalah sangat mudah dan tersedia. Hal ini berdampak kepada kerawanan kawasan oleh berbagai gangguan (pencurian kayu dan perburuan satwa).
- c). TWA Gunung Meja bukan merupakan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum ada program spesifik yang menjadi arahan kerja pengelola.
- d). Belum ada koordinasi yang baik terkait penyusunan rencanan, pelaksanaan dan evaluasi program pengelolaan terutama dengan pihak pemerintah daerah dan pihak swasta termasuk perguruan tinggi dan LSM.
- e). Kebijakan pembatasan anggaran bagi badan pengelola oleh pemerintah yang berdampak terhadap tidak dilakukannya sejumlah program pengelolaan.
- f). Pemenuhan sejumlah kebijakan prasyarat pengelolaan kawasan melalui izin usaha pengelolaan jasa wisata alam dan sarana wisata

alam (IUPJWA/IUPSWA) diantaranya DED dan dokumen kelayakan finansial.

Berdasarkan hasil identifikasi sejumlah permasalahan tersebut, dirumuskan Upaya mencegah, menanggulangi kerusakan dan ketidakberhasilan pengelolaan TWA Gunung Meja melalui beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a). Mengupayakan pemenuhan dokumen pelengkap IUPJWA dan IUP SWA guna memenuhi aspek legalitas pengelolaan.
- b). Guna mengurangi resiko dampak perubahan tutupan lahan hutan, perlu revegetasi pada semua areal yang telah berubah secara ekologis termasuk wilayah pemukiman milik masyarakat melalui komitmen bersama.
- c). Mengupayakan proses perencanaan yang berbasis multi sektor/phak dalam merumuskan upaya pengelolaan berbasis potensi kawasan.
- d). Untuk kegiatan revegetasi dapat dikembangkan jenis tanamam buah-buahan/obat-obatan sebagai tanaman pelindung (*protecting three*) dan bernilai ekonomis (*economic three*) terutama jenis tanaman berfungsi ganda (*multi purpose tree species/MPTS*) pada wilayah-wilayah yang terbuka.

## 2. Tujuan

Target upaya pengelolaan yang dirumuskan merupakan komponen penting dan harus diciptakan guna mencapai suatu tujuan program pengelolaan TWA Gunung Meja yang meliputi; kombinasi



pendekatan perencanaan dari atas dan dari bawah, penguatan pengawasan, evaluasi multi pihak, penegakan hukum, konsistensi kebijakan, meningkatnya fungsi dan intensitas partisipasi masyarakat, sosialisasi intensif, keterbukaan masyarakat dan program pengelolaan.

Melakukan hal-hal tersebut di atas memungkinkan tercapainya keberhasilan program pengelolaan yang dapat menciptakan kondisi positif berikut; tutupan hutan akan bertambah, populasi flora dan fauna meningkat, lahan yang terdegradasi berkurang, debit air akan bertambah.

### 3. Upaya yang Dapat Dilaksanakan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, perumusan tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan TWA Gunung Meja berbasis partisipasi masyarakat harus memberdayakan peran-serta masyarakat di dalam/sekitar kawasan. Kebijakan pengelolaan ditujukan terutama untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah penyangga dalam hal ini Kampung Ayambori yang terdapat sekitar kawasan, sehingga masyarakat harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan kawasan, sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Alternatif Upaya Pengelolaan TWA Gunung Meja Berbasis Kolaborasi

No	Kondisi Kearah Positif yang harus diciptakan	Alternatif Upaya
1.	Kombinasi perencanaan dari atas dan dari bawah	a. Membuat perencanaan program yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat b. Memberi prioritas terhadap usulan masyarakat
2.	Menguatnya	a. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan



---

	pengawasan dalam pelaksanaan program	pelaksanaan b. Melibatkan instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam pengawasan pelaksanaan
3.	Evaluasi multipihak	a. Melibatkan masyarakat dalam evaluasi hasil program b. Melibatkan instansi dari lembaga swadaya masyarakat terkait dalam evaluasi program
4.	Tegaknya hukum/peraturan	a. Pelanggaran hukum/aturan ditindak sesuai hukum/aturan yang berlaku b. Melakukan penyuluhan hukum
5.	Konsistensi kebijakan	c. Melakukan dan meningkatkan pengawasan kawasan a. Mengupayakan kebijakan terbaru sesuai potensi kawasan b. Pembangunan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan arahan blok pengelolaan
6.	Meningkatkan fungsi partisipasi masyarakat	a. Melibatkan masyarakat pada fungsi partisipasi perencanaan b. Melibatkan masyarakat pada fungsi partisipasi pemeliharaan c. Melibatkan masyarakat pada fungsi partisipasi manajemen
7.	Meningkatnya intensitas partisipasi masyarakat	a. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan program pengelolaan b. Meningkatkan kemauan masyarakat untuk melakukan inisiatif tindakan c. Melibatkan masyarakat dalam pengendalian program
8.	Sosialisasi program intensif	a. Melakukan dan meningkatkan frekuensi sosialisasi program b. Setiap tahapan program disosialisasikan
9.	Keterbukaan masyarakat	a. Melakukan penyuluhan b. Memberi pemahaman pada masyarakat tentang nilai ekologi dan ekonomi hasil-hasil program
10.	Program reboisasi atraktif	a. Menggunakan tanaman multi guna untuk kegiatan reboisasi dilahan yang dikuasai masyarakat b. Menggunakan bibit tanaman MPTS yang berkualitas c. Melakukan pemeliharaan intensif d. Merancang kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

---

Berdasarkan hasil perumusan upaya pengelolaan yang dapat dilakukan, alternatif upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam program



@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

pengelolaan antara lain : (1) melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, melakukan inisiatif tindakandan pengendalian program; (2) meningkatkan frekuensi sosialisasi,(3) melakukan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti ekonomi dan arti ekologi hasil-hasil program pengelolaan hutan lindung; (4) menggunakan tanaman multi guna berkualitas dan dipelihara secara intensif serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi unsur masyarakat di TWA Gunung Meja mencakup kelompok pemimpin, minat, kepala keluarga, ibu rumah tangga dan pemuda dengan tingkat partisipasi “sangat tidak aktif” yang dipengaruhi fungsi partisipasi masyarakat yang umumnya pada pelaksana kegiatan dan intensitas partisipasi unsur masyarakat yang umumnya memberikan konsultasi dan memberikan informasi.
2. Upaya pengelolaan yang dilakukan meliputi:
  - a). Mengupayakan terbentuknya Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sehingga menjadi dasar pengelolaan program;
  - b). Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, melakukan inisiatif tindakan dan pengendalian program;
  - c). Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti ekonomi dan arti ekologi hasil-hasil program pengelolaan;
  - d). Mengupayakan program peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan bibit sayuran dan bibit tanaman MPTS.



## 5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka terdapat beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Guna memberi kepastian pengelolaan kawasan sesuai potensi yang dimiliki, sehingga perlu diupayakan izin pengelolaan jasa dan sarana wisata alam.
2. Partisipasi unsur masyarakat dalam program pengelolaan TWA Gunung Meja perlu lebih ditingkatkan, melalui (a) peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, manajemen, pengambilan keputusan, inisiatif tindakan dan pengendalian; (b) meningkatkan frekuensi sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomi dan nilai ekologi hasil-hasil program; (c) mengupayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pengembangan usaha.
3. Mengupayakan dan mengoptimalkan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D. 1985 Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Berencana. Orba Sakti, Bandung.
- Admawijaya, R. 1995. Sumber Hayati Hutan Indonesia. Prosiding Simposium Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi di Jakarta (Endang, S; Herman, H; Ishemat, S (penyunting) h 297-306. Fahutan IPB, Yayasan Gunung Menghijau, Yayasan Pendidikan Abarwati, Jakarta.
- Anonim. 1990. Undang - Undang Nomor : 5/1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Arikounto, S. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arimbi, H. P., dan M. A. Santosa. 1993. Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Walhi dan Friends of the Earth – Indonesia.
- Barber C.V, Matthews E, Achmaliadi R, Adi M. I.G.G, Hardiono Y.M, Kartodihardjo H, Malley F.CH, Mampioer D.A, Manurung E.G.T, Nababan A, Pangkali L.B. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia : Forest Watch Indonesia dan Washington D.C : Global Forest Watch
- Bratawinata, A.A., 1988. Ekologi Hutan Tropis dan Metode Analisis Hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda
- Berry, D. 1995. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Radja Grafindo Persada, Jakarta. 270 h.
- Fahutan-IPB. 1995. Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Menuju Era Sertifikasi Ekolabel. Dalam Suhendang, E; H. Heuruman; I. Surianegoro (Penyunting). 1995. Prosiding Simposium Penerapan EKolabel di Hutan Produksi di Jakarta. Fakultas Kehutanan IPB/Yayasan Gunung Menghijau/Yayasan Pendidikan Abarwati, Jakarta.
- Margiyono. 1999. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Mubyarto dan S. Kartodirjo. 1988. Pembangunan Pedesaan Indonesia. Liberty, Yogyakarta.



- Nuburi J. 2014. Persepsi dan Sikap Masyarakat Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Skripsi Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua
- Pattipi K. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong. Draf Tesis Magister Ilmu Lingkungan Universitas Papua.
- Pamulardi, B. 1999. Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Kehutanan. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pranoto, H. 2001. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Penerepana Desentralisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal (Sebuah Studi di Kutai Kertanegara). Tesis Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sallatang, M. A. 1987. Faktor-Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Sulawesi Tengah. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Sangaji, A. 2002. Politik Konservasi Orang Katu di Behoa Kakau. (S. A. Awang (penyunting). KpSHK, Bogor.
- Sardjono, M. A. 1995. Diktat Agroforestri (tidak dipublikasikan) Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sardjono, M. A. 1998. Interdependensi Sosial-Ekonomi Masyarakat Dengan Pembangunan Kehutanan dan Tekanannya Terhadap Sumberdaya Hutan di Kalimantan Timur. Laporan Penelitian. Kerjasama Penelitian Antara Balai Penelitian Kehutanan dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sarjono, M. A. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari. Makalah pada Seminar Regional Amdal “ Sistem Sertifikasi pengelolaan Hutan Produksi yang Letari “ Kerjasama Silva Mulawarman-PT. Petebe Mas Bahagia – Envirosystem Indonesia. Samarinda.
- Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya. Debut Press, Jogyakarta
- Sarijanto, T. 1995. Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Prosiding Simposium Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi di Jakarta. (Endang, S., Herman, H.,Ishemat, S. (penyunting) h 1-10. Fahutan IPB, Yayasan Gunung Menghijau, Yayasan Pendidikan Abarwati, Jakarta.



- Sembiring., F. Husbani., A. M. Arif., F. Ifalerina., F. Hanif. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. NRM Program. .
- Simpoha, J. M. 1998. Masalah Pengakuan Formal atas Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Luar Jawa. Duta Rimba majalah Bulanan Perum Perhutani No. 213/XXII, Penerbit Perum Perhutani, Jakarta.
- Simon, H. 2001. Kehutanan Pasca Millenium 2000; Epistemologi Kehutanan Masyarakat. Komoniti. Vol. 1. No. 1. h 4 – 7.
- Sinery A, 2013. Strategi Pengelolaan Populasi Kuskus (*Spilogocus maculatus*) di Pulau Numfor Provinsi Papua. Disertasi Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Sinery A, Chandradewana Boer dan Farida W.R. 2013. Population dynamics of cuscus in tourist island of Ahe, District of Nabire, Papua. Biodiversitas IX (2) 95 - 100
- Sinery A dan Mahmud, 2013. Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Agrifor X (2) 35-40 Untag Samarinda.
- Sinery A.S, Angrianto R., Rahawarin Y dan Peday H.F.Z, 2015. Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Deepublish, Yogyakarta.
- Sinery A.S dan Manusawai J, 2016. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Jurnal Manusia dan Lingkungan 23 (3): 394-401
- Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat yang Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Siswanto, H. 1998. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG dalam Rencana Penataan Hutan Pendidikan Bukit Soeharto. Tesis Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman
- Soemarwoto, O. 1987. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta.
- Soelaeman, M. M. 1998. Ilmu Sosial Dasar. Refika Aditama, Bandung.
- Sudjana. 1992. Metode Statistika. Tarsito, Bandung.
- Suparmoko. M, 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.



- Sutisna, M. 2002. Saran Pengelolaan Hutan Secara Manfaat Berkelanjutan, Kerakyatan, Keadilan, Kebersamaan, Keterpaduan. Membangun Visi Bersama Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Kabupaten Pasir Bekerjasama Dengan Center For International Forestry Research, Tanah Grogot. 14 h.
- Sutrisno, A. 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Hutan Lindung Tarakan. Tesis Pascasarjana Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Voss, F., 1983. Atlas East Kalimantan Transmigration Area Development Project (TAD). Cooperation between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany : Department of Manpower and Transmigration, Jakarta.
- Zain, A. S. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Rineka Cipta, Jakarta..
- Zakaria, R. Y. 1994. Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. WALHI, Jakarta.

Lampiran 1. Data Responden

No	Responden	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
Pemimpin/Tokoh Masyarakat				
1	Korneles Mandacan	SMA	Petani	
2	Yermias Mandacan S.Sos	S1	PNS	
Kelompok Minat				
1	Permenas Inggeduek	SMA	Petani	
2	Nathaniel Saroy	SMP	Petani	
3	Hasan Mandacan	SMP	Petani	
4	Kristian Mandacan	SMA	Petani	
Kepala Keluarga				
1	Demianus Aska SH	S1	PNS	
2	Marlon Mandacan	SD	Petani	
3	Amon Mandacan	SD	Petani	
4	Timotius Mandacan	SD	Petani	
5	Budi Mandacan	SD	Petani	
6	Esrom Mandacan	SMA	Petani	
7	Seppy Aska	SMA	Petani	
8	Yulianus Aska	SD	Petani	
9	Aser Ahoren	SMP	Petani	
10	Otto Mandacan	SMP	Petani	
11	Awin Mandacan	SMP	Petani	
12	Niko Mandacan	SD	Petani	
13	Victor Mandacan	SD	Petani	
14	Yoseph Mandacan	SD	Petani	
15	Fitri Inggeduek	SD	Petani	
16	Feri Mandacan	SD	Petani	
17	Agus Dowansiba	SD	Petani	
18	Andira Mandacan	SMA	Petani	
Perempuan				
1	Salomina Mandacan	SD	Petani	
2	Yanti Mandacan	SD	Petani	
3	Brendina Mandacan	SD	PNS	
4	Ina Mandacan	SD	Petani	
5	Novalina Mandacan	SD	Petani	
6	Lice Aska	SD	Petani	
7	Yubelina Mandacan	SD	Petani	
8	Agustina Mandacan	SD	Petani	
Pemuda				

@Hak cipta pada UNIPA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran undang.

---

1	Nikolaus Mandacan	SMA	Pelajar
2	Iwan Mandacan	SMP	Pelajar
3	Dominggus Mandacan	SD	Pelajar
4	Yusuf Mandacan	SD	Pelajar
5	Godlief Saimar	SD	Pelajar
6	Yermias Mandacan	SD	Pelajar
7	Yulius Mandacan	SD	Pelajar
8	Feri Mandacan	SD	Pelajar
9	Gideon Mandacan	SMP	Pelajar

---

Lampiran 2. Partisipasi Masyarakat Ayambori Berdasarkan Program Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja

No	Responden	Kegiatan Pengelolaan							Jumlah	Fungsi	Intensitas
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017					
		Sosialisasi Fungsi Kawasan*5	Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan*5	Rehabilitasi Kawasan (BPDASRR)*3	Patroli Pengamanan Kawasan (Mitra)*4	Patroli Pengamanan Kawasan (Mitra)*4	Pembangunan Pagar Batas Kawasan*3	Sosialisasi Pelopor Revolusi Mental di Ruang Publik*5			
Pemimpin/Tokoh Masyarakat											
1	Korneles Mandacan	1	1	1			1	1	5	Planning	Decision Making
2	Yermias Mandacan S.Sos	1	1	1			1	1	5	Planning	Decision Making
2	Jumlah	2	2	2				2	8		
Kelompok Minat											
1	Permenas Inggeduek		1		1		1	1	4	Implementation	Decision Making
2	Nathaniel Saroy	1			1	1	1		4	Implementation	Decision Making
3	Hasan Mandacan		1	1	1	1		1	5	Maintenance	Initiation Action
4	Kristian Mandacan	1		1		1	1	1	5	Maintenance	Initiation Action
4	Jumlah	2	2	2	3	3	3	3	18		
Kepala Keluarga											
1	Demianus Aska SH	1		1			1	1	4	Use	Consultation
2	Marlon Mandacan		1		1	1		1	4	Implementation	Consultation
3	Amon Mandacan	1		1		1	1		4	Maintenance	Consultation
4	Timotius Mandacan		1	1			1	1	4	Use	Consultation
5	Budi Mandacan	1			1	1	1		4	Implementation	Consultation
6	Esrom Mandacan		1	1		1	1	1	4	Maintenance	Consultation
7	Seppy Aska	1		1			1	1	4	Use	Consultation



8	Yulianus Asca		1	1		1	1		4	Maintenance	Consultation
9	Aser Ahoren	1		1			1	1	4	Use	Consultation
10	Otto Mandacan	1		1		1	1		4	Maintenance	Consultation
11	Anin Mandacan	1		1			1	1	4	Use	Consultation
12	Niko Mandacan		1			1	1	1	4	Maintenance	Consultation
13	Victor Mandacan	1	1	1			1		4	Use	Consultation
14	Yoseph Mandacan		1	1		1	1		4	Maintenance	Consultation
15	Fitri Inggeduek	1		1			1	1	4	Use	Consultation
16	Feri Mandacan	1		1		1	1		4	Maintenance	Consultation
17	Agus Dowansiba		1	1			1	1	4	Use	Consultation
18	Andi Mandacan	1		1		1	1		4	Maintenance	Consultation
21	Jumlah	11	8	15	2	10	17	9	72		
Perempuan											
1	Salomina Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
2	Yanti Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
3	Brendina Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
4	Ina Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
5	Novalina Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
6	Lice Aska	1		1				1	3	Use	Informing
7	Yubelina Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
8	Agustina Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
19	Jumlah	8	0	8	0	0	0	8	24		
Pemuda											
1	Nikolaus Mandacan	1		1				1	3	Use	Informing
2	Iwan Mandacan										



3	Dominggus Mandacan			1				1	2	Use	Informing
4	Yusuf Mandacan			1				1	2	Use	Informing
5	Godlief Saimar	1		1				1	3	Use	Informing
6	Yermias Mandacan			1				1	2	Use	Informing
7	Yulius Mandacan	1					1		2	Use	Informing
8	Feri Mandacan			1				1	2	Use	Informing
9	Gideon Mandacan										
17	Jumlah	3	0	6	0	0	2	5	16		



@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin.
2. Memerbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini meru

menyebutkan sumbernya.  
an pelanggaran Undang-undang.

Lampiran 3. Bentuk Fungsi dan Intensitas Partisipasi Masyarakat Kampung Ayambori Berdasarkan Unsur Masyarakat

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat (Fungsi)	Jumlah Responden		No	Bentuk Partisipasi Masyarakat (Intensitas)	Jumlah Responden	
		Ayambori	Persen (%)			Ayambori	Persen (%)
1.	Management	0	0,00	1.	Total Control	0	0,00
2.	Planning	2	5,13	2.	Initiation Action	2	5,13
3.	Implementation	4	10,26	3.	Decision Making	4	10,26
4.	Maintenance	10	25,64	4.	Consultation	18	46,15
5.	Distribution / use	23	58,97	5.	Informing	15	38,46
Jumlah responden berpartisipasi		39	95,12	Jumlah responden berpartisipasi		39	95,12
Jumlah responden tidak berpartisipasi		2	4,88	Jumlah responden tidak berpartisipasi		2	4,88
Jumlah		41	100,00	Jumlah		41	100,00

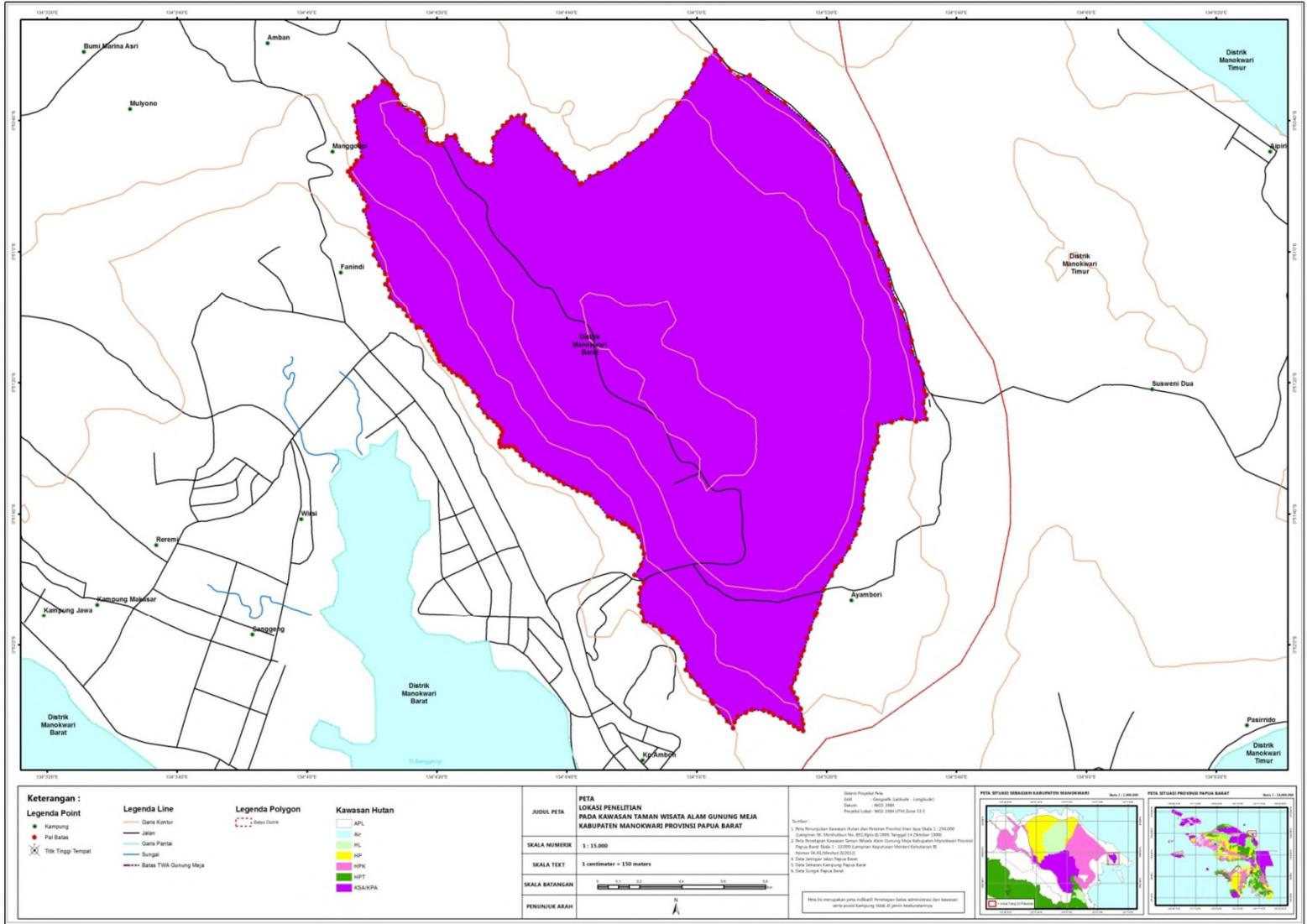


@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya ini tanpa izin pembuatnya.  
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya ini untuk kepentingan komersial.

# Lampiran 4. Peta Lokasi Penelitian

ye-  
-Ludang.





@Hak cipta pada UNIPA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini merupakan pelanggaran Undang-undang.

# LAMPIRAN